WORKING PAPER
PPIK NO. 011219

PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DAN TERENTASKAN DI INDONESIA

WILMAR SALIM, ST., M.REG.DEV., PH.D
ULY FAOZIYAH, ST., MT

PUSAT PENELITIAN INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN (PPIK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

The Discussion and Working Paper series aim to disseminate ideas for information and discussion. Comments and arguments for improvement of their presentation are welcome. The views expressed in the papers are those of the authors and do not necessary reflect those of The Research Center for Infrastructure and Regional Development.

ISSN 2656-7601

Editor
Uly Faoziyah, ST., MT.

Cover Design
Uly Faoziyah, ST., MT.

Published by **The Research Center for Infrastructure and Regional Development** (Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan), Bandung Institute of Technology.
Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Indonesia
Phone/Fax: +62-22-2507070 E-mail: susi@staff.itb.ac.id

© Wilmar Salim, ST., M.Reg.Dev., Ph.D. and Uly Faoziyah, ST., MT.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the copyright holder for which application should be addressed in the first instance to the publisher.

EDITORIAL BOARD

Advisory Board	:	Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, MS.	
Chief Editor	:	Prof. Ir. Haryo Winarso M.Eng., Ph.D	Land and Housing Development. Peri-urban and Innercity Development
Editor's Member	:	Wilmar A. Salim ST,M.Reg.Dev.,Ph.D.	Poverty and decentralization, climate change and regional development
		Delik Hudalah, ST. MT., M.Sc., Ph.D	Peri-urbanization; suburbanization; mega-urbanization; metropolitan governance; decentralization; institutionalism
		Ir. Arief Sudradjat, MIS., Ph.D.	Water smart and resilient city, domestic water supply monitoring and evaluation, water safety plan, low impact development/green infrastructure, climate change and integrated water resources management
		Dr. Allis Nurdini, ST. MT	Housing need and demand analysis, housing typo-morphology, research methodology for housing and settlement
		Hadi Kardana, ST., M.Reg.Dev., Ph.D	Water engineering
		Ir. Tubagus Furqon Sofhani MA,Ph.D.	Capacity building and regional development, difussion of innovation and social network, climate change and regional development
Layouting	:	Uly Faoziyah, ST., MT Hadiyan Wijaya, ST	
Secretariat	:	Susi Agustini	

Address:
Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan (PPIK)
Gedung PAU Lantai 4 Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
Phone: +62-22-2507070
Fax: +62-22-2507070
E-mail: susi@staff.itb.ac.id

DAFTAR ISI

EDITORIAL BOARD 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 7
ABSTRAK 8
1. PENDAHULUAN 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Tujuan dan Sasaran Kajian 10
1.3 Studi Pustaka tentang Daerah Tertinggal di Indonesia 10
1.4 Pendekatan dan Metodologi Studi 14
1.4.1 Pendekatan Kajian 14
1.4.2 Kerangka Kajian 14
1.4.3 Metode Pengumpulan Data 15
1.4.4 Metode Analisis Data 16
2. DEFINISI DAN KATEGORI DAERAH TERTINGGAL 19
2.1 Definisi Daerah Tertinggal 19
2.2 Kategorisasi Daerah Tertinggal dan Terentaskan versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 22
2.3 Kategorisasi Daerah Tertinggal versi Perhitungan 24
2.4 Perbedaan Kategorisasi Daerah Tertinggal dan Terentaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Perhitungan 26
3. ANALISIS PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL DAN TERENTASKAN 35
3.1 Analisis Persebaran Daerah Tertinggal 35
3.2 Analisis Persebaran Daerah Terentaskan di Indonesia 42
3.3 Sintesa Tipologi Daerah Tertinggal dan Terentaskan di Indonesia 47
4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL 49
4.1 Faktor Infrastruktur 52
4.2 Faktor Aksesibilitas 55
4.3 Faktor Karakteristik Wilayah 56
4.4 Faktor Ekonomi 56
4.5 Faktor Sumber Daya Manusia 57
4.6 Faktor Kapasitas Keuangan Daerah 58
4.7 Sintesa Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Daerah Tertinggal di Indonesia 59
5. SIMPULAN 66
6. DAFTAR PUSTAKA 67
7. LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian-Kajian Daerah Tertinggal di Indonesia 12
Tabel 2 Kebutuhan Data Sekunder 16
Tabel 3 Indikator Daerah Tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.... 21
Tabel 4 Kategorisasi Daerah Tertinggal Menurut Pulau Versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 23
Tabel 5 Kategorisasi Daerah Tertinggal Menurut Pulau Versi Perhitungan 25
Tabel 6 Perbedaan Kategorisasi Daerah Tertinggal dan Terentaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Hasil Perhitungan 27
Tabel 7 Daftar Daerah Tertinggal Versi Kementerian dan Daerah Terentaskan Versi Perhitungan Tahun 2009 28
Tabel 8 Daftar Daerah Terentaskan Versi Kementerian dan Daerah Tertinggal Versi Perhitungan Tahun 2009 29
Tabel 9 Daftar Daerah Tertinggal Versi Kementerian dan Daerah Terentaskan Versi Perhitungan Tahun 2014 29
Tabel 10 Daftar Daerah Tertinggal dan Terentaskan Versi Kementerian dan Daerah Tertinggal Versi Perhitungan Tahun 2014 30
Tabel 11 Daftar Daerah Terentaskan Versi Kementerian dan Perhitungan 2009 dan 2014 .. 32
Tabel 12 Daftar Daerah Tertinggal tahun 2009 dan Daerah Terentaskan tahun 2014 versi Kementerian dan Perhitungan 32
Tabel 13 Daerah Tertinggal Menurut Kawasan 35
Tabel 14 Daerah Tertinggal Menurut Pulau 36
Tabel 15 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal Menurut Wilayah 2009 40
Tabel 16 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal Menurut Wilayah 2014 41
Tabel 17 Gap Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal Menurut Wilayah 2009 dan 2014 41
Tabel 18 Daerah Terentaskan Menurut Kawasan 42
Tabel 19 Daerah Terentaskan Menurut Pulau 43
Tabel 20 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan Menurut Wilayah di Indonesia 2009 46
Tabel 21 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan Menurut Wilayah di Indonesia 2014 46
Tabel 22 Gap Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan Menurut Wilayah di Indonesia 2014 dan 2009 47
Tabel 23 Sintesa Tipologi Daerah Tertinggal dan Terentaskan di Indonesia 47
Tabel 24 Indikator Statistik pada tiap Indeks Utama Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan 2009 50
Tabel 25 Indikator Statistik pada tiap Indeks Utama Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan 2014 51
Tabel 26 Prosentase Perubahan Indikator Statistik pada tiap Indeks Utama Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan 2009-2014 52
Tabel 27 Prosentase Peningkatan Indikator Infrastruktur pada Daerah Terentaskan di Indonesia 54

Tabel 28 Prosentase Peningkatan Indikator Aksesibilitas pada Daerah Terentaskan di Indonesia 55
Tabel 29 Prosentase Peningkatan Indikator Karakteristik Wilayah pada Daerah Terentaskan di Indonesia 56
Tabel 30 Prosentase Peningkatan Indikator Ekonomi pada Daerah Terentaskan di Indonesia 57
Tabel 31 Prosentase Peningkatan Indikator Sumber Daya Manusia pada Daerah Terentaskan di Indonesia 58
Tabel 32 Prosentase Peningkatan Indikator Kapasitas Keuangan Daerah pada Daerah Terentaskan di Indonesia 58
Tabel 33 Sintesis Indikator Statistik yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Daerah Tertinggal di Indonesia 60
Tabel 12 Perkembangan Daerah Tertinggal Indonesia 2004, 2009, dan 2014 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Kerja Penelitian 15
Gambar 2 Peta Perkembangan Daerah Terentaskan dan Tertinggal Versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi 24
Gambar 3 Peta Perkembangan Daerah Terentaskan dan Tertinggal Versi Perhitungan..... 26
Gambar 4 Peta Perbedaan Daerah Terentaskan dan Tertinggal Versi Kementerian Desa, Pembangunan dan Tertinggal, dan Transmigrasi serta Perhitungan 33
Gambar 5 Peta Perkembangan Daerah Tertinggal 2004, 2009, dan 2014 dan Kota di Indonesia 39
Gambar 6 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal di Indonesia 2009 dan 2014 40
Gambar 7 Peta Perkembangan Daerah Terentaskan dan Kota di Indonesia 44
Gambar 8 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan di Indonesia 2009 dan 2014..... 45

ABSTRAK

Menjelang dua puluh tahun pasca Otonomi Daerah diimplementasikan di Indonesia, Indonesia belum seluruhnya lepas dari ketertinggalan yang ditunjukkan dengan masih terdapat 122 kabupaten yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal. Permasalahan ketertinggalan sendiri sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan ketidakberdayaan dari sisi internal wilayah, seperti terbatasnya sumber daya atau pun kepasitas daerah, tapi juga dari keterkaitannya dengan wilayah eksternal, sehingga penilaian terkait pola perkembangan daerah tertinggal menjadi sangat penting. Terkait hal tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif serta teknik analisis pembobotan, analisis statistik deskriptif, serta analisis spasial, penelitian ini dilakukan dengan memverifikasi ktagori ketertinggalan wilayah, mengidentifikasi pola spasial ketertinggalan dan pengentasan ketertinggalan, serta mengidentifikasi faktor statistik yang berpengaruh dalam pengentasan ketertinggalan.

Hasil analisis menemukan bahwa pengentasan ketertinggalan di Indonesia masih sangat bias tidak hanya pada Barat Indonesia, tapi juga masih banyak mengandalkan efek penjalaran dari wilayah perkotaan yang berada di sekitar daerah tertinggal. Selain itu juga ditemukan bahwa pada sebagian besar daerah terentaskan yang diamati, penurunan jumlah penduduk miskin juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang signifikan berkorelasi positif terhadap pengentasan daerah tertinggal.

Kata Kunci: daerah tertinggal, terentaskan, pola persebaran

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyebutkan bahwa "keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil, sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain." Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang telah berlangsung, khususnya 6 tahun setelah Otonomi Daerah diimplementasikan di Indonesia, masih belum mampu menyelesaikan permasalahan kesenjangan antar daerah, sehingga masih terdapat daerah-daerah yang perkembangannya relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya, yang disebut dengan daerah tertinggal.

Pada tahun 2004, terdapat 199 kabupaten yang termasuk pada katagori daerah tertinggal. Lima tahun kemudian 50 kabupaten telah terentaskan dari predikat daerah tertinggal, tapi terdapat penambahan sebesar 34 kabupaten yang termasuk dalam katagori daerah tertinggal dan semuanya merupakan daerah otonomi baru, sehingga pada tahun 2009 sebesar 183 kabupaten. Pada tahun 2014, meskipun mengalami penurunan yang cukup pesat sebesar 38,69% dari tahun 2009, masih terdapat 122 kabupaten yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal dengan rincian penurunan 70 kabupaten dan penambahan 9 daerah otonomi baru. Hal ini menunjukkan bahwa klaim manfaat pemberian kekuasaan dan tanggung jawab pada level pemerintahan yang lebih rendah dalam mengelola wilayahnya sendiri untuk mengatasi heterogenitas permasalahan pembangunan antar wilayah serta mengentaskan ketertinggalan dan kemiskinan wilayah sebagaimana yang disampaikan oleh Goerl & Seiferling (2014), Asante & Ayee (2008), Bardhan (2002), dan Oates (2008), nyatanya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan di Indonesia.

Pengentasan ketertinggalan di Indonesia melibatkan dinamika permasalahan yang kompleks mengingat heterogenitas karakteristik dan permasalahan yang tinggi, sehingga heterogenitas ini berpeluang menimbulkan fragmentasi pembangunan dalam lingkup yang lebih luas karena pengelolaan daerah oleh Pemerintah Daerah tidak diikuti dengan integrasi pembangunan antar wilayah. Kajian yang dilakukan oleh Hofman dan Kaiser (2004) menyebutkan bahwa pemberian kekuasaan yang besar pada Pemerintah Daerah berimplikasi pada pemimpin-pemimpin lokal yang berlaku seperti *raja-raja kecil* yang tidak akuntabel terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah-nya, serta sulit untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengintegrasikan pembangunan. Bahkan Imron (2011); Butt (2010); dan Firman (2009) menambahkan bahwa egosentris dari sisi pemimpin lokal dalam menerima tanggung jawab mengelola daerahnya, seperti yang terjadi di Indonesia, justru mendorong pada pemekaran wilayah, yang tidak hanya meningkatkan beban Pemerintah Pusat untuk membiayai pembiayaan daerah, tapi juga tidak menyelesaikan masalah ketertinggalan. Pada kasus ketertinggalan wilayah di Indonesia, pada periode 2004-2009, dari 199 daerah tertinggal, 36 kabupaten melakukan pemekaran dan menghasilkan 43 daerah otonomi baru dan sebagian besar diantaranya masih tetap masuk dalam katagori daerah tertinggal pada penetapan tahun 2009.

Perbedaan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, seperti yang dijelaskan oleh Kessler dan Lessmann (2010), Syaukani et al (2002), dan Firman (2009) juga menjadikan kompleksitas masalah semakin berat dan

mengarah pada semakin tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan daerah-daerah yang kaya sumber daya dan memiliki kapasitas pemerintah yang baik akan mampu mengambil peluang otonomi daerah sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya tanpa kesulitan karena semua fondasi pembangunan sudah tersedia di wilayah tersebut. Sementara ketidakberdayaan daerah tertinggal dalam mengelola sumber daya di wilayahnya justru berkorelasi negatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatkan ketergantungan wilayah tersebut terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat. Kondisi-kondisi ini tentu berbeda dengan harapan implementasi kebijakan ini yang diharapkan mampu mengurangi jurang ketimpangan antar wilayah serta mendorong kemandirian wilayah.

Studi-studi yang ada saat ini masih banyak berfokus pada dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, seperti yang dilakukan oleh Kessler & Lessmann (2010), Persyn & Algoed (2009), Davoodi & Zou (1998), dan Smoke & Lewis (1996), tapi masih sangat jarang studi-studi yang berfokus pada penilaian pola-pola ketertinggalan dan pengentasan daerah tertinggal ini. Padahal, penilaian pola ini akan membantu pengambil kebijakan untuk memahami secara mendalam bagaimana fenomena pengentasan ketertinggalan terjadi di Indonesia, sehingga pengentasan ketertinggalan tidak hanya dilakukan secara parsial dengan menyasar pada daerah tertinggal, tapi juga mampu dilakukan secara terintegrasi, baik antar daerah tertinggal, maupun antara daerah tertinggal dengan daerah yang sudah terentaskan/maju. Selain itu, penilaian pola ini juga akan membantu untuk memahami faktor apa yang berkontribusi besar terhadap pengentasan ketertinggalan. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini dilakukan.

1.2 Tujuan dan Sasaran Kajian

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran dari kajian ini sebagai berikut.

1. Teridentifikasinya katagorisasi daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia
2. Teridentifikasinya persebaran daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia
3. Terindentifikasinya faktor yang mempengaruhi pengentasan ketertinggalan di Indonesia

1.3 Studi Pustaka tentang Daerah Tertinggal di Indonesia

Studi mengenai ketertinggalan suatu wilayah atau masyarakat telah banyak dilakukan di dunia. Friedmann dan Weaver (1979b) menyebut daerah tertinggal merupakan daerah dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang gagal untuk mengembalikan keuntungan investasi mereka.Selain itu daerah ini juga tidak mampu mengimbangi kapitalisasi sektor pertanian dan pertambangan yang terjadi di wilayah maju akibat lokasinya yang jauh dari pasar utama serta mengalami ketertinggalan teknologi. Hal ini akan diperparah dengan lemahnya kualitas institusi atau kelembagaan politik ekonomi yang akan mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi dan politik yang berjalan di wilayah tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Acemoglu dan Robinson (2012) dalam bukunya yang berjudul "*Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*".

Kajian yang dilakukan oleh Hidenori (2014) di Uttarakhand, daerah tertinggal di India menemukan bahwa pembangunan industri skala besar di sekitar Uttarakhand berhasil meningkatkan interaksi kawasan industri tersebut dengan Uttarakhand, mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, meningkatkan

pembangunan kawasan terbangun dan fasilitas publik yang memadai, hingga akhirnya daerah ini mampu bangkit dari ketertinggalan. Banski dan Wesolowska (2010); Wu (2001); serta Pichler-Millanovich (1994) yang melakukan penelitian di bidang permukiman, menemukan bahwa adanya perubahan peningkatan kualitas permukiman (termasuk perubahan konstruksinya) yang diikuti dengan kebijakan revitalisasi permukiman oleh pemerintah telah mempercepat transformasi pembangunan di suatu wilayah menjadi lebih maju atau tidak tertinggal dan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Prasad (1982) juga menggambarkan adanya perubahan pengelolaan sumber air bersih mampu mendorong transformasi ekonomi pada daerah yang miskin/tertinggal. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur lainnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Buchhofer (1995); Cooke, Uranga, & Etxebarria (1998). Kajian menarik lainnya dilakukan oleh Justice Brandeis dalam Strumpf (2002) yang menemukan bahwa inovasi dalam pembangunan yang muncul akibat kebebasan untuk mengembangkan wilayah mendorong pembangunan di negara-negara bagian Amerika Serikat menjadi lebih maju.

Meskipun studi ketertinggalan sangat beragam di dunia, tapi studi yang secara spesifik menggambarkan ketertinggalan dan pengentasan ketertinggalan di Indonesia masih sangat terbatas. Studi-studi yang ada masih banyak banyak berfokus pada satu aspek ketertinggalan (misal ekonomi, infrastruktur), serta melihat ketertinggalan sebagai kondisi yang terjadi di internal wilayah tersebut tanpa melihat kondisi di sekitar daerah tertinggal tersebut yang berpeluang untuk membantu atau pun menghambat pengentasan ketertinggalan. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya studi yang komprehensif dalam memandang permasalahan ketertinggalan wilayah. Apalagi permasalahan ini telah masuk menjadi dari Prioritas Nasional Nawacita ketiga, yakni "*Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan*".

Tabel 1 Kajian-Kajian Daerah Tertinggal di Indonesia

NO	JUDUL KAJIAN	PENULIS DAN TAHUN KAJIAN	FOKUS PENELITIAN	METODE ANALISIS	HASIL TEMUAN
1	Reducing Spatial Inequality in Indonesia: Off-The-Job Training As A Special Treatment for Underdeveloped Regions	Muhamad (2018)	• Kajian mengasumsikan Jawa sebagai daerah yang berkembang dan luar Jawa sebagai daerah kurang berkembang • Identifikasi potensi *off job training* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di luar Jawa	Ekonometri dengan mempertimbangkan: • Pendapatan • Tingkat pendidikan • *Off job training* • Lokasi tinggal (Jawa/Luar Jawa) • Pulau utama di Indonesia • Efek interaksi antara tingkat pendidikan dan lokasi tinggal • Efek interaksi antara *off job training* dengan lokasi tinggal	• Gap pendidikan yang tinggi antara Jawa dan luar Jawa • Masyarakat di luar Jawa mendapatkan tingkat pengembalian *job training* yang lebih tinggi daripada masyarakat di Jawa
2	Strategi Pengembangan Daerah tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Perdesaan	Syahza (2013)	• Fokus pada daerah tertinggal Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan Daerah Otonomi Baru, yang masih tertinggal meskipun berdekatan dengan lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun • Fokus pada kendala pengembangan ekonomi serta model penguatan daerah tertinggal sebagai hinterland di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infrastruktur, sumber daya, serta pariwisata	• Developmental Research yang menitikberatkan pada data primer (diperoleh dengan metode *Rapid Rural Appraisal*) • Pemilihan lokasi dilakukan secara klaster, sementara sampel masyarakat miskin dipilih dengan menggunakan purposive sampling • Analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif	• Kendala pengembangan ekonomi adalah lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, ketersediaan lahan dan kesuburan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi, keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi, serta lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani • Pengembangan sektor pertanian dengan sistem agribisnis berpeluang besar untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan membantu mendorong pengurangan kemiskinan yang masif di Kabupaten Kepulauan Meranti
3	Chained to Development? Livelihoods and	Neilson dan Shonk (2014)	• Fokus pada penilaian *value chain* pada produser kopi kecil di komunitas perdesaan tertinggal	• Pendekatan *value chain*	• Intervensi *value chain* dalam perkebunan kopi berkontribusi signifikan unutk meningkatkan kesejahteraan

NO	JUDUL KAJIAN	PENULIS DAN TAHUN KAJIAN	FOKUS PENELITIAN	METODE ANALISIS	HASIL TEMUAN
	Global Value Chains in the Coffee-Producing Toraja Region of Indonesia				masyarakat dan berpeluang untuk menurunkan kemiskinan di desa tersebut
4	Tipologi Ketertinggalan Desa di Kabupaten Situbondo dengan Analisis pada ArcGIS dan Excel	Raharjo dan Koswara (2018)	• Penilaian ketertinggalan pada level desa di Kabupaten Situbondo yang termasuk kabupaten tertinggal	• Penilaian tipologi ketertinggalan dengan menggunakan analisis klaster dengan mempertimbangkan jalan utama, listrik, air bersih, telekomunikasi, SD, SMP, sarana perdagangan, produksi pangan, tingkat kemiskinan, lama waktu sekolah, tingkat melek huruf, tingkat pengangguran, dan lembaga keuangan mikro	• Terdapat 3 tipologi ketertinggalan wilayah (sangat tertinggal, moderat, dan relatif maju). Tingkat ketertinggalan ini berkaitan dengan lokasi desa yang jauh dari pusat pertumbuhan dan jaringan jalan nasional (Pantura)
5	Proliferation Pattern in Underdeveloped Region: Is it the Real Solution to Solve Underdeveloped Region's Problem in Decentralized Indonesia?	Faoziyah dan Salim (2016)	• Penilaian pola pemekaran wilayah pada daerah tertinggal di Indonesia	• Analisis spasial pada beberapa tahun 2004, 2009 dan 2014, baik sebelum maupun sesudah pemekaran	• Sebagian besar pemekaran wilayah yang terjadi di daerah-daerah tertinggal tidak mengentaskan daerahnya dari ketertinggalan, tapi justru melepaskan sejumlah besar masyarakat miskin ke daerah otonomi barunya, sehingga hal ini meringankan beban bagi daerah induk, tapi memperberat tanggungan oleh pemerintah daerah di daerah otonomi baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut

1.4 Pendekatan dan Metodologi Studi

1.4.1 Pendekatan Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan sudut pandang *positivist* untuk mengembangkan pengetahuan dan melakukan strategi penyelidikan seperti eksperimen dan survey serta mengumpulkan data pada instrumen yang telah ditentukan yang menghasilkan data statistik (Creswell, 2013). Lebih lanjut, Sawitri & Andini (2009) menyatakan bahwa arah kajian kuantitatif adalah mendeskripsikan keadaan masa lalu, keadaan masa sekarang, dan hubungan antar variabel serta pengembangan model untuk melihat masa depan dan pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan aspek fisik, ekonomi, penduduk, dan sarana prasarana.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat pola secara makro daerah-daerah tertinggal serta daerah-daerah terentaskan di Indonesia berdasarkan data-data statistik yang digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pendekatan ini juga digunakan untuk memverifikasi apakah daerah-daerah tertinggal dan terentaskan yang ditetapkan oleh kementerian merupakan daerah yang benar-benar tertinggal atau sebaliknya. Hal ini perlu dilakukan untuk menguji kredibilitas daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian mengingat terdapat isu *lobbying* politik yang menyebabkan daerah yang telah ditetapakan tidak benar-benar tertinggal atau terentaskan. Selain itu verifikasi daerah tertinggal dan terentaskan ini akan menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya untuk melakukan pemilihan lokasi studi yang akan diteliti secara langsung di daerah. Pendekatan kuantitatif juga akan digunakan untuk melihat faktor-faktor yang secara statistik menyebabkan daerah-daerah yang benar-benar terentaskan di Indonesia.

1.4.2 Kerangka Kajian

Kajian ini berawal dari terbatasnya penelitian yang membahas ketertinggalan wilayah dalam konteks yang lebih luas, yang tidak hanya melihat ketertinggalan dalam satu daerah tertinggal merupakan permasalahan internal wilayah yang menyebabkannya tidak mampu berkompetisi dengan kemajuan daerah lain, tapi juga melihat ketertinggalan secara makro sehingga dapat ditemukan hal-hal yang paling berpengaruh dalam menentukan pengetasan ketertinggalan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan daftar kabupaten yang termasuk dalam katagori daerah tertinggal pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Akan tetapi dalam realitanya penetapannya sendiri menimbulkan polemik dikarenakan dianggap tidak benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Perubahan predikat dari "daerah tertinggal" menjadi "daerah terentaskan" merupakan prestasi yang sangat bernilai bagi pemimpin daerah, sehingga mereka berlomba untuk mencapai predikat tersebut, yang mana terkadang hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, semisal *lobbying* politik. Di sisi lain, pada daerah yang telah terentaskan sendiri, juga menimbulkan polemik karena ternyata tidak semua desa di wilayah tersebut telah terentaskan juga hilangnya beberapa potensi pendanaan dari pusat, seperti Dana Alokasi Khusus Daerah Tertinggal. Oleh karenanya studi ini berupaya untuk memverifikasi perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan menggunakan metode dan data yang sama.

Selanjutnya pada tahapan berikutnya juga akan dilihat sebaran spasial pada daerah-daerah yang telah terentaskan dengan menggunakan data-data yang telah diverifikasi. Analisis ini hanya akan melihat pada dua periode waktu, yakni pada tahun 2009 dan 2014. Daerah yang terentaskan pada tahun 2009 merupakan daerah tertinggal yang mampu entas dari kondisinya pada tahun 2004. Begitu pula daerah terentaskan pada tahun 2014 juga merupakan daerah yang mampu entas dari kondisinya pada tahun 2009, sehingga pada analisis tersebut hanya menggunakan dua tahun saja. Analisis spasial pada daerah yang telah terentaskan ini juga berupaya untuk melihat aglomerasi daerah tertinggal serta keterkaitannya dengan wilayah lain, sehingga dapat menjawab bagaimana pengaruh dari kriteria ekternal (faktor lokasional) terhadap pengentasan daerah tertinggal. Pola spasial daerah tertinggal di Indonesia, pola spasial daerah terentaskan, serta perkembangan indikator-indikator daerah tertinggal ini selanjutnya akan disintesiskan menjadi pola-pola daerah terentaskan di Indonesia.

Selain itu pada analisis daerah terentaskan ini juga berupaya untuk melihat perkembangan indikator-indikator daerah tertinggal (terdapat 6 indikator utama), sehingga dapat diketahui pada indikator mana saja yang berpengaruh terhadap pengentasan di daerah tertinggal ini. Analisis kuantitatif ini tidak hanya berhenti pada enam kriteria utama, tapi juga berupaya untuk melihat pada indikator-indikator dari tiap kriteria ketertinggalan tersebut. Hasil analisis ini akan menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengentasan daerah tertinggal pada daerah-daerah yang benar-benar terentaskan secara statistik.

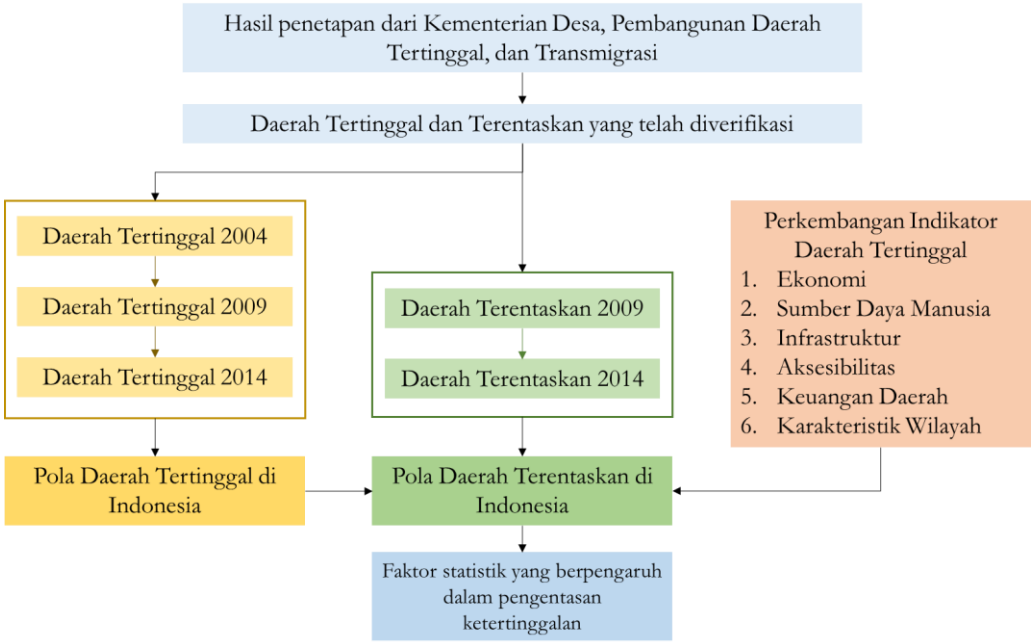

Gambar 1 Kerangka Kerja Penelitian

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai institusi yang membawahi ketertinggalan wilayah maupun institusi statistik. Data sekunder dipilih dikarenakan besarnya cakupan kabupaten yang akan diidentifikasi, yakni sebesar 199 kabupaten yang termasuk katagori tertinggal, sehingga penggunaannya akan memungkinkan peneliti untuk melihat

gambaran secara besar dan mampu mengidentifikasi hal-hal yang berpengaruh dalam pengentasan ketertinggalan wilayah dalam konteks yang lebih luas. Adapun data-data sekunder yang digunakan sebagai berikut.

Tabel 2 Kebutuhan Data Sekunder

Klasifikasi Data		Data-Data yang Dibutuhkan	Tahun Data	Sumber Data
Perekonomian Masyarakat	1	Persentase Penduduk Miskin	2009 dan 2014	Susenas
	2	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	2009 dan 2014	Susenas
Sumber Daya Manusia (SDM)	3	Angka Harapan Hidup	2009 dan 2014	Susenas
	4	Rata-rata Lama Sekolah	2009 dan 2014	Susenas
	5	Angka Melek Huruf	2009 dan 2014	Susenas
Sarana dan Prasarana	6	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Aspal/Beton	2009 dan 2014	Podes
	7	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Diperkeras	2009 dan 2014	Podes
	8	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Tanah	2009 dan 2014	
			2009 dan 2014	Podes
	9	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Lainnya	2009 dan 2014	
			2009 dan 2014	Podes
	10	Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon	2009 dan 2014	Susenas
	11	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	2009 dan 2014	Susenas
	12	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	2009 dan 2014	Susenas
	13	Persentase desa yg mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen	2009 dan 2014	Podes
	14	Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan per 1000 Penduduk	2009 dan 2014	Podes
	15	Jumlah Dokter per 1000 penduduk	2009 dan 2014	Podes
	16	Jumlah SD dan SMP per 1000 Penduduk	2009 dan 2014	Podes
Kapasitas Keuangan Daerah	17	Kemampuan Keuangan Daerah	2009 dan 2014	Kemenkeu
Aksesabilitas	18	Rata-Rata jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi	2009 dan 2014	Podes
	19	Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km	2009 dan 2014	Podes
	20	Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar	2009 dan 2014	Podes
Karakteristik Daerah	21	Persentase Desa Gempa Bumi	2009 dan 2014	Podes
	22	Persentase Desa Tanah Longsor	2009 dan 2014	Podes
	23	Persentase Desa Banjir	2009 dan 2014	Podes
	24	Persentase Desa Bencana Lainnya	2009 dan 2014	Podes
	25	Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung	2009 dan 2014	Podes
	25	Persentase Desa Berlahan Kritis	2009 dan 2014	Podes
	27	Persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir	2009 dan 2014	Podes
Spasial	28	Peta administrasi kabupaten kota di Indonesia	2004, 2009, dan 2014	BIG

1.4.4 Metode Analisis Data

Secara umum analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang berada dalam pendekatan *instrumental rationality* yang melihat bahwa realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkrit, dapat diamati dengan panca indra, dapat dikatagorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dan diversifiasi dan melihat hubungan antar variabel sebagai hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2010). Terkait hal tersebut, analisis kuantitatif dilakukan untuk memberikan gambaran permasalahan secara statistik dalam memahami perkembangan

daerah tertinggal. Berikut adalah bentuk-bentuk analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Analisis Pembobotan

   Analisis pembobotan merupakan teknik analisis yang melibatkan berbagai indikator secara bersama-sama dengan memberi bobot pada masing-masing indikator tersebut. Analisis ini dimaksudkan untuk memverifikasi penetapan daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia. Pada dasarnya, dalam penetapan daerah tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapakan berbagai indikator, bobot, dan arah pada masing-masing indikator, sebagaimana yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya. Semakin tinggi bobot, maka semakin penting pula indikator tersebut dalam menentukan ketertinggalan suatu wilayah. Lalu arah/tanda menentukan arah hubungan pada masing-masing indikator. Apabila tanda positif, maka semakin tinggi indikator tersebut, maka suatu daerah akan semakin tertinggal, tetapi apabila tanda negatif maka semakin tinggi indiaktor maka daerah akan semakin tidak tertinggal. Adapun tahapan analisis pembobotan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional, sebagai berikut.

   1) Penetapan indikator ketertinggalan

      Indikator yang digunakan terdiri dari 27 indikator yang dikelompokkan ke dalam 6 kriteria, yaitu ekonomi (2 indikator), sumber daya manusia (3 indikator), sarana dan prasarana (11 indikator), aksesibilitas (3 indikator), karakteristik daerah (6 indikator), dan kemampuan keuangan daerah (1 indikator)

   2) Standarisasi nilai indikator

      Standarisasi perlu dilakukan karena 27 indikator yang digunakan memiliki satuan ukuran yang berbeda-beda yang tidak memungkinkan untuk dianalisis secara langsung. Oleh karenanya, agar tiap nilai indikator dapat diperbandingkan satu sama lain, maka dilakukan standarisasi nilai indikator dengan menghitung *Z-score* untuk masing-masing indikator dengan mempertimbangkan rata-rata dan simpangan baku untuk masing-masing indikator.

   3) Penentuan bobot dan arah indikator

      Penentuan bobot dan arah tiap indikator mengikuti bobot dan arah tiap indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga hal ni mendorong agar hasil verifikasi yang akan dilakukan dapat dibandingkan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

   4) Penghitungan indeks komposit

      Indeks komposit dilakukan dengan menjumlahkan 27 nilai indikator yang telah distandarisasi dikalikan dengan bobot dan arah pada masing-masing indikator.

   5) Penentuan klasifikasi kabupaten

      Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, pengkatagorian daerah tertinggal dibagi menjadi lima katagori, yaitu kabupaten berpotensi maju, agak tertinggal, tertinggal, sangat tertinggal, dan parah. Akan tetapi dalam kajian ini, klasifikasi kabupaten akan dibagi menjadi dua katagori saja, yaitu kabupaten tertinggal dan terentaskan dikarenakan ketidaksamaan data dasar yang diperoleh oleh peneliti yang mana pada penetapan 2004

dan 2014, hanya ditetapkan 2 katagori, yaitu tertinggal dan tidak tertinggal. Hal ini tentu berbeda dengan penetapan daerah tertinggal tahun 2010 yang menetapkan daerah tertinggal berdasarkan lima katagori. Hal lain yang melandasinya adalah belum jelasnya parameter pengukuran lima katagori tersebut. Pada tahun 2010, parameter ditetapkan secara statik, sementara berdasarkan petunjuk teknis tersebut digunakan parameter dinamis. Oleh karenanya penentuan daerah tertinggal hanya dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu daerah tertinggal dan tidak tertinggal.

2. Analisis Statistik Deskriptif

   Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan penggambaran data yang dijelaskan dari ukuran-ukuran penting (Kountur, 2004). Fenomena pola ketertinggalan dan pengentasan wilayah di daerah tertinggal ini dapat dipahami melalui data-data statistik terkait terutama terkait dengan ekonomi wilayah, sumber daya manusia, sarana prasarana, aksesibilitas, karakteristik daerah, serta keuangan lokal. Perubahan-perubahan ini disinyalir memberikan gambaran pengentasan ketertinggalan di daerah-daerah tertinggal. Dalam hal ini analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menilai gap antara pencapaian tahun 2009 dan 2014.

3. Analisis Spasial

   Analisis spasial dipergunakan untuk memperkuat argumen peneliti terkait dengan pola perkembangan daerah tertinggal dan terentaskan. Bailey dan Gatrell (1995) mendefinisikan analisis spasial sebagai upaya memanipulasi data spasial ke dalam berbagai bentuk-bentuk dan mengekstrak pengertian-pengertian tambahan sebagai hasilnya. Dengan adanya data spasial (data yang memiliki referensi geografis) maka visualisasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis mengenai pola atau pengelompokan di dalam ruang geografis serta mengenai peranan lokasi terhadap aktivitas manusia serta sistem lingkungan (Mac Eachren 1995 dalam Rustiadi, Panuju, and Saefulhakim 2003). Kajian yang dilakukan dalam analisis spasial ini menekankan pada bagaimana fenomena spasial yang terjadi pada daerah-daerah tertinggal, sehingga perlu dijelaskan menggunakan analisis data keruangan yang memanfaatkan GIS (*Geographical Information System*).

2. DEFINISI DAN KATEGORI DAERAH TERTINGGAL

Bab ini akan membahas definisi dan kategorisasi daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia, baik didasarkan pada hasil yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun hasil perhitungan sendiri. Pada bagian akhir akan membahas perbandingan perbedaan antara dua versi kategorisasi daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia.

2.1 Definisi Daerah Tertinggal

Istilah "tertinggal" seringkali dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan yang memiliki berada di belakang hal lainnya dan memiliki keterbatasan dalam mencapai sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertinggal bermakna ditinggalkan dan tercecer, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tertinggal erat kaitannya dengan kondisi dimana suatu hal tidak mampu mengikuti standar atau zaman yang berlaku, sehingga ia ditinggalkan. Lalu dalam Oxford Dictionary, tertinggal atau *backward* mengandung makna berada di belakang, mundur menjadi lebih buruk, memiliki progres yang lebih lambat daripada kondisi normal atau yang diperkirakan. Hal tersebut juga mengandung makna bahwa tertinggal merupakan suatu kondisi yang berada di bawah kondisi normal atau yang diharapkan.

Term "tertinggal" atau "*backward*" atau "*underdeveloped*" kemudian juga sering dikaitkan dengan kondisi wilayahnyang tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan daerah lainnya. Pemaduan antara istilah tertinggal dengan wilayah ini dikarenakan meskipun daerah tertinggal terlihat sebagai bagian minor dalam sebuah tema pembangunan yang terpolarisasi, tapi banyak daerah atau negara yang menyatakan bahwa dalam wilayahnya tidak memiliki daerah tertinggal, tapi pada kenyataannya daerah tertinggal ini selalu eksis dalam berbagai tipe negara, dari negara terkaya sampai negara termiskin (Robinson (1969) dalam Friedmann & Weaver (1979)).

Saat ini konsepsi daerah tertinggal (*backward region/underdeveloped region*) masih menjadi perdebatan antar ahli dan definisinya saat ini masing sangat kontekstual, tergantung pada pemahaman antar negara dan antar ahli dalam memahami ketertinggalan suatu wilayah. Meher (1999) berupaya untuk menjelaskan term *backward region* sebagai daerah yang memiliki kegiatan pertanian dengan tingkat industrialisasi yang sangat rendah, penyediaan infrastruktur yang buruk, serta kondisi sosial ekonomi yang lemah. Nayyar (2005), meskipun dari negara yang sama dengan Meher, mendefinisikan daerah tertinggal sebagai hal yang berbeda yang mana daerah tertinggal dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik wilayah berupa gurun, berada di wilayah perbatasan, daerah dengan konsentrasi penduduk tribal yang tinggi, serta daerah dengan tingkat pendapatan rendah dan pengangguran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu negara saja, pemahaman daerah tertinggal dapat berbeda, tergantung pada indikator yang digunakan.

Dalam konteks Indonesia, daerah tertinggal juga memiliki *term* yang berbeda-beda, tergantung pada instansi yang mendefinisikan daerah tertinggal tersebut. Dalam pandangan Bappenas (2006), daerah tertinggal merupakan daerah yang mempunyai aksesibilitas rendah terhadap pusat-pusat pertumbuhan karena minimnya sarana dan prasarana perhubungan atau letak geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah yang ditandai oleh masyarakatnya yang tergolong sebagai masyarakat pra sejahtera dengan tingkat pelayanan sosial dan fasilitas umum yang rendah. Daerah tertinggal kebanyakan

berada pada lokasi geografis di pedalaman, pegunungan, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang terbatas dan didominasi mata pencaharian pertanian dan perikanan skala kecil. Adat istiadat masyarakat pun masih sangat kuat sehingga sulit untuk menerima budaya dari luar yang mengakibatkan rendahnya penguasaan teknologi oleh masyarakat. Sementara pada tahun 2009, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (saat ini bernama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mendefinisikan daerah tertinggal sebagai daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kriteria ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah (KPDT, 2009). Hal yang menarik adalah tujuh tahun kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional menghapus penjelaskan kriteria dalam definisi tersebut, menjadi "*daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakat kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional*".

Secara umum tidak ada perbedaan dalam penentuan daerah tertinggal, baik pada penetapan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 yang mana penetapannya diukur dengan menggunakan enam kriteria utama, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah serta 27 indikator penilaian pada masing-masing kriteria sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut. Meskipun demikian, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional menyatakan bahwa selain enam kriteria utama tersebut, terdapat kriteria daerah tertentu yang dapat dipertimbangkan,yaitu:

1. Jumlah desa tertinggal
2. Daerah rawan pangan
3. Daerah perbatasan
4. Daerah rawan bencana
5. Daerah pasca konflik
6. Daerah pulau kecil dan terluar

Tabel berikut menggambarkan kriteria dan indikator daerah tertinggal.

Tabel 3 Indikator Daerah Tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Kriteria Utama	Bobot Kriteria	Indikator		Penjelasan Indikator	Arah	Bobot Indikator
Perekonomian Masyarakat	20%	1	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan	(-)	10%
		2	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	Jumlah konsumsi yang dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari rumah tangga dan menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah	(+)	10%
Sumber Daya Manusia (SDM)	20%	3	Angka Harapan Hidup	Perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu	(-)	10%
		4	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	(-)	5%
		5	Angka Melek Huruf	Prosentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari	(-)	5%
Sarana dan Prasarana	20%	6	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Aspal/Beton	Jumlah desa yang memiliki jalan utama terluas aspal/beton dalam sebuah kabupaten	(-)	1,5%
		7	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Diperkeras	Jumlah desa yang memiliki jalan terluas diperkeras dalam suatu kabupaten	(+)	1,5%
		8	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Tanah	Jumlah desa yang memiliki jalan terluas tanah dalam suatu kabupaten	(+)	1,5%
		9	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Lainnya	Jumlah desa yang memiliki jalan terluas lainnya dalam suatu kabupaten	(-)	1,5%
		10	Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon	Jumlah rumah tangga pengguna telepon dalam suatu kabupaten dibagi 100%	(-)	2%
		11	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam suatu kabupaten dibagi 100%	(-)	2%
		12	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dalam suatu kabupaten dibagi 100%	(-)	2%
		13	Persentase desa yg mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen	Jumlah desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen dalam suatu kabupaten dibagi 100%	(+)	2%
		14	Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan per 1000 Penduduk	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan	(-)	2%
		15	Jumlah Dokter per 1000 penduduk	Jumlah dokter suatu kabupaten	(-)	2%
		16	Jumlah SD dan SMP per 1000 Penduduk	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar	(-)	2%

Kriteria Utama	Bobot Kriteria	Indikator		Penjelasan Indikator	Arah	Bobot Indikator
Kapasitas Keuangan Daerah	10%	17	Kemampuan Keuangan Daerah	Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya.	(-)	10%
Aksesabilitas	20%	18	Rata-Rata jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi	Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi	(+)	6,67%
		19	Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km	Jumlah desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan > 5 Km dibagi 100%	(+)	6,67%
		20	Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar	Rata-rata jarak dari desa ke pelayanan pendidikan dasar	(+)	6,67%
Karakteristik Daerah	10%	21	Persentase Desa Gempa Bumi	Jumlah desa dengan keberadaan gempa bumi dan yang mengalami gempa bumi selama 3 tahun terakhir dibagi dengan 100%	(+)	1,43%
		22	Persentase Desa Tanah Longsor	Jumlah desa dengan keberadaan tanah longsor dan yang mengalami tanah lonsor selama 3 tahun terakhir dibagi dengan 100%	(+)	1,43%
		23	Persentase Desa Banjir	Jumlah desa yang mengalami banjir selama 3 tahun terakhir dibagi dengan 100%	(+)	1,43%
		24	Persentase Desa Bencana Lainnya	Jumlah desa yang mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir dibagi dengan 100%	(+)	1,43%
		25	Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah desa yang memiliki kawaan hutan lindung dibagi dengan 100%	(+)	1,43%
		25	Persentase Desa Berlahan Kritis	Jumlah desa yang memiliki lahan kritis dibagi dengan 100%	(+)	1,43%
		27	Persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir	Jumlah desa yang mengalami konflik selama 1 tahun terakhir dibagi dengan 100%	(+)	1,43%

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016

2.2 Kategorisasi Daerah Tertinggal dan Terentaskan versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan daftar daerah tertinggal dan terentaskan dalam periode 5 tahunan, yakni 2004, 2009, dan 2014. Pada tahun 2004 terdapat 199 daerah tertinggal, lalu pada tahun 2008 terdapat 183 daerah tertinggal (50 terentaskan dan 39 merupakan daerah otonomi baru), dan pada tahun 2014 terdapat 122 daerah tertinggal (70 terentaskan dan 9 daerah otonomi baru). Dalam proses penetapan daerah tertinggal ini terdapat unsur pemekaran yang mana sebanyak 36 kabupaten/kota (18,09%) melakukan pemekaran wilayah, sehingga menghasilkan 43 daerah otonomi baru. Dalam proses kategorisasi ini, unsur pemekaran akan dihilangkan, sehingga total daerah yang dikategorisasikan ulang sebanyak 163 kabupaten/kota.

Tabel berikut menggambarkan kategorisasi daerah tertinggal menurut pulau yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berdasarkan rilis data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar daerah tertinggal di Indonesia berada di Sumatera sebanyak 20,86% dari total daerah tertinggal di Indonesia dan diikuti dengan Maluku Papua yang memiliki daerah tertinggal sebanyak 25 kabupaten/kota atau sebanyak 15,34%. Lalu pada tahun 2014, dominasi daerah tertinggal bergeser dari Pulau Sumatera ke wilayah Maluku Papua yang mengindikasikan bahwa dalam rentang tahun 2009-2014 tidak terjadi banyak perubahan dalam pengentasan di Maluku-Papua.

Sementara menurut rilis daerah terentaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat 45 daerah yang terentaskan (tanpa pemekaran) pada tahun 2009 dengan pengentasan paling tinggi berada di Pulau Sumatera dan Sulawesi yakni sebanyak 16 dan 11 kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2014, mampu mengentaskan sebanyak 52 kabupaten/kota dengan dominasi pengentasan masih berada di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.

Tabel 4 Kategorisasi Daerah Tertinggal Menurut Pulau Versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Katagori	Jumlah Daerah Tertinggal			Proporsi Daerah Tertinggal dan Terentaskan		
		2004	2009	2014	2004	2009	2014
I	**Daerah Tertinggal Keseluruhan**	**199**					
II	**Daerah Tertinggal Pemekaran**	**36**					
III	**Total Daerah Tertinggal dan Terentaskan Non Pemekaran**	**163**	**163**	**118**	***100.00***	***100.00***	***100.00***
a	*Daerah Tertinggal*	*163*	*118*	*66*	*100.00*	*72.39*	*55.93*
	Sumatera	50	34	6	30.67	20.86	5.08
	Jawa	17	9	6	10.43	5.52	5.08
	Bali Nusa Tenggara	17	16	13	10.43	9.82	11.02
	Kalimantan	19	13	9	11.66	7.98	7.63
	Sulawesi	32	21	10	19.63	12.88	8.47
	Maluku Papua	28	25	22	17.18	15.34	18.64
b	*Daerah Terentaskan*	*0*	*45*	*52*	*0.00*	*27.61*	*44.07*
	Sumatera	-	16	28	-	9.82	23.73
	Jawa	-	8	3	-	4.91	2.54
	Bali Nusa Tenggara	-	1	3	-	0.61	2.54
	Kalimantan	-	6	4	-	3.68	3.39
	Sulawesi	-	11	11	-	6.75	9.32
	Maluku Papua	-	3	3	-	1.84	2.54

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar berikut menggambarkan pemetaan perkembangan daerah yang terentaskan dan tertinggal di Indonesia menurut rilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2009 dan 2014. Berdasarkan rilis data tersebut, maka dapat diketahui bahwa daerah tertinggal terkonsentrasi pada wilayah timur Indonesia dan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Pada tahun 2009, daerah tertinggal terkonsentrasi di wilayah Papua, terutama yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, serta daerah perbatasan lain di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa ketertinggalan diindikasikan akibat kurangnya akses kepada infrastruktur serta sumber daya dan berada jauh

dari pusat-pusat pertumbuhan. Lalu pada tahun 2014, ketertinggalan yang berada pada wilayah terluar mulai terentaskan, tapi masih belum mampu mengurangi dominasi ketertinggalan di wilayah timur dan perbatasan Indonesia. Selain itu dapat pula diketahui bahwa penurunan daerah tertinggal pada tahun 2014 lebih tinggi daripada 2009.

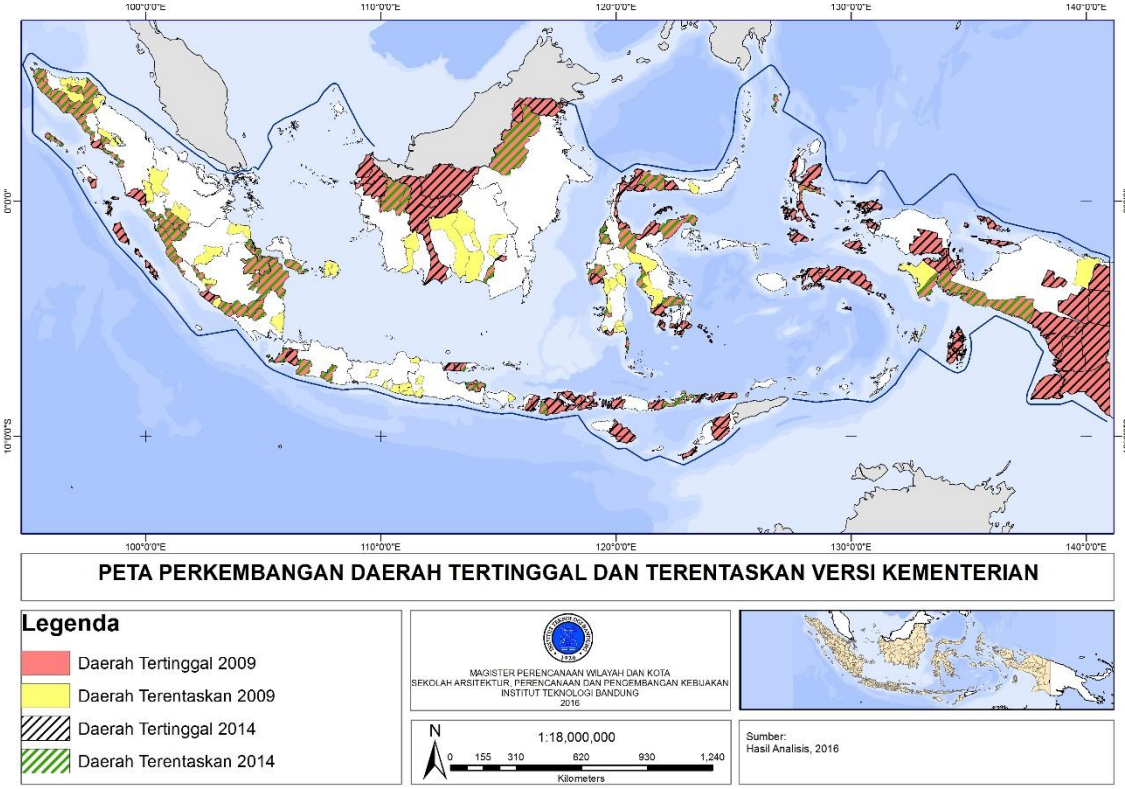

Gambar 2 Peta Perkembangan Daerah Terentaskan dan Tertinggal Versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi

Sumber: Hasil Analisis, 2016

2.3 Kategorisasi Daerah Tertinggal versi Perhitungan

Bagian ini berupaya untuk menggambarkan kategorisasi daerah tertinggal versi perhitungan yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan data dan metode yang sama dengan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perhitungan ulang ini perlu dilakukan mengingat terdapat isu adanya *lobbying* politik dalam penetapan daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa daerah tertinggal atau pun terentaskan yang dirilis tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya.

Pada tahun 2009, terdapat daerah tertinggal sebanyak 117 daerah tertinggal dan pada tahun 2014 terdapat 97 daerah tertinggal. Daerah tertinggal versi perhitungan ini, sama dengan versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni terkonsentrasi di Sumatera dan Maluku Papua, meskipun jumlahnya berbeda. Pada Pulau Sumatera, daerah tertinggal sebesar 32 kabupaten/kota atau 19,63% dari keseluruhan kabupaten/kota dan Maluku Papua sebesar 27 kabupaten/kota atau 16,65%. Pada tahun 2014, konsentrasi daerah tertinggal masih berpusat di dua wilayah tersebut, hal ini berbeda dengan rilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

menyebutkan bahwa konsentrasi daerah tertinggal pada 2014 telah bergeser dari Sumatera ke Maluku Papua. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat perbedaan dalam hal perhitungan ulang dengan yang telah dirilis oleh kementerian.

Selanjutnya, pada daerah yang terentaskan juga memiliki perbedaan antara yang ditetapkan dengan versi perhitungan ulang. Baik hasil dari rilis kementerian maupun perhitungan menunjukkan kesamaan, yakni pengentasan daerah tertinggal berfokus pada wilayah Sumatera dan Sulawesi. Akan tetapi perbedaannya, pada tahun 2014, pengentasan daerah tertinggal justru mengalami penurunan dibandingkan dengan rilis kementerian. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2014, daerah baru yang terentaskan dari ketertinggalan sebanyak 23 kabupaten/kota atau jauh lebih rendah daripada pengentasan ketertinggalan pada tahun 2009 yakni sebanyak 46 kabupaten/kota. Hal ini berbeda jauh dari rilis kementerian yang menyebutkan bahwa tanpa pemekaran, daerah yang terentaskan sebanyak 52 kabupaten/kota atau terdapat sebanyak 29 kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Tabel 5 Kategorisasi Daerah Tertinggal Menurut Pulau Versi Perhitungan

No	Katagori	Jumlah Daerah Tertinggal			Proporsi Daerah Tertinggal dan Terentaskan		
		2004	2009	2014	2004	2009	2014
I	**Daerah Tertinggal Keseluruhan**	**199**					
II	**Daerah Tertinggal Pemekaran**	**36**					
III	**Total Daerah Tertinggal dan Terentaskan Non Pemekaran**	**163**	**163**	**120**	***100.00***	***100.00***	***100.00***
a	*Daerah Tertinggal*	*163*	*117*	*97*	*100.00*	*71.78*	*80.83*
	Sumatera	50	32	20	30.67	19.63	16.67
	Jawa	17	7	3	10.43	4.29	2.50
	Bali Nusa Tenggara	17	16	16	10.43	9.82	13.33
	Kalimantan	19	13	15	11.66	7.98	12.50
	Sulawesi	32	22	17	19.63	13.50	14.17
	Maluku Papua	28	27	26	17.18	16.56	21.67
b	*Daerah Terentaskan*	*0*	*46*	*23*	*0.00*	*28.22*	*19.17*
	Sumatera	-	18	13	-	11.04	10.83
	Jawa	-	10	4	-	6.13	3.33
	Bali Nusa Tenggara	-	1	0	-	0.61	0.00
	Kalimantan	-	6	0	-	3.68	0.00
	Sulawesi	-	10	5	-	6.13	4.17
	Maluku Papua	-	1	1	-	0.61	0.83

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: pada tahun 2014, terdapat 3 daerah yang dikategorikan sebagai daerah terentaskan pada tahun 2009, tapi jusru kembali menjadi daerah tertinggal pada tahun 2014

Gambar berikut menggambarkan perkembangan daerah tertinggal versi perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahun 2009, daerah tertinggal masih berfokus di wilayah timur Indonesia dan wilayah-wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lalu pada tahun 2014, daerah yang terentaskan versi perhitungan tidak sebanyak yang dirilis oleh kementerian, sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak daerah tertinggal yang tersebar, terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan terluar Indonesia.

Pengentasan daerah tertinggal versi perhitungan cenderung berada pada daerah-daerah pesisir Indonesia.

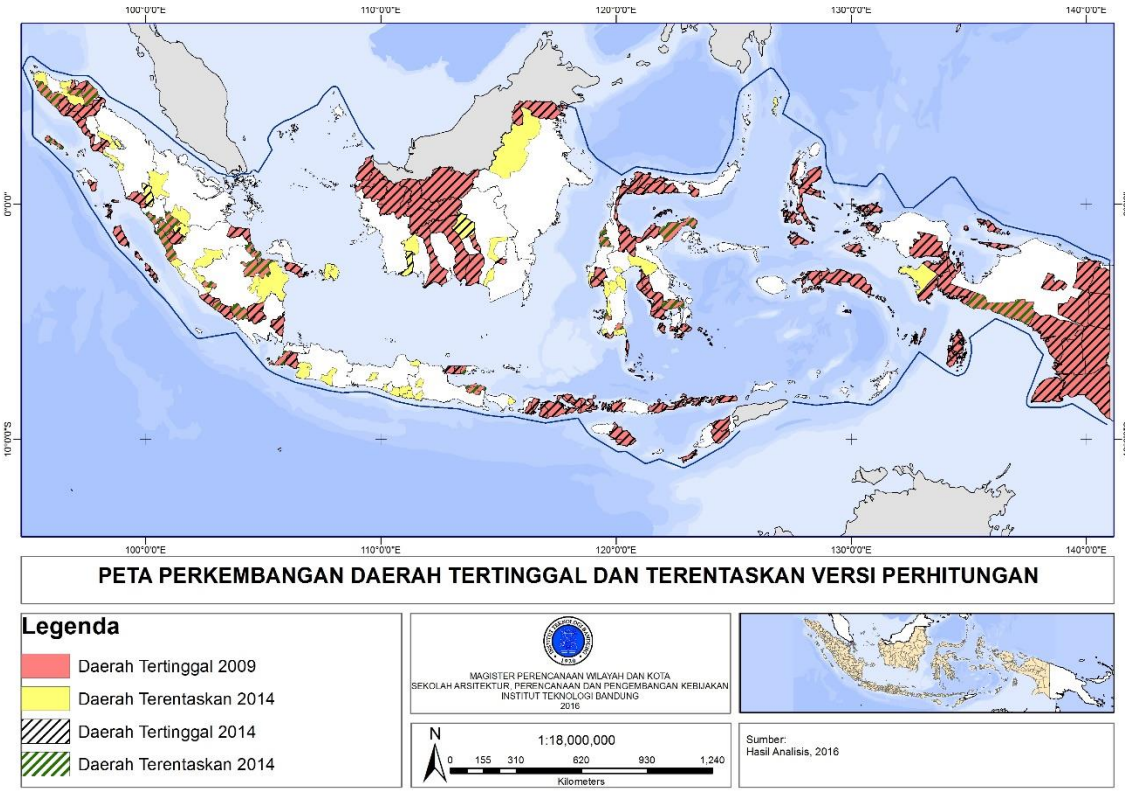

Gambar 3 Peta Perkembangan Daerah Terentaskan dan Tertinggal Versi Perhitungan
Sumber: Hasil Analisis, 2016

2.4 Perbedaan Kategorisasi Daerah Tertinggal dan Terentaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Perhitungan

Pada bagian ini akan berupaya untuk mengetahui perbedaan kategorisasi daerah tertinggal dan terentaskan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembanguann Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Tabel berikut menggambarkan perbedaan kategorisasinya. Pada tahun 2009, daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian berjumlah 118 kabupaten/kota, sementara hasil perhitungan sebesar 117 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat, terdapat satu daerah yang seharusnya termasuk dalam katagori daerah bukan tertinggal, tapi masuk ke dalam katagori daerah tertinggal. Dari sisi perwilayahan pulau, daerah tertinggal yang berada di Bali-Nusa Tenggara dan Kalimantan jumlahnya sama antara rilis kementerian dan perhitungan yang menunjukkan bahwa daerah tertinggal yang ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Pada wilayah timur Indonesia, yakni di Sulawesi dan Maluku Papua terdapat tiga kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan klasifikasi daerah tertinggal yang menunjukkan bahwa terdapat daerah yang dari sisi perhitungan tertinggal, tapi dalam rilis kementerian justru sebaliknya. Pada wilayah barat Indonesia, justru terjadi sebaliknya. Daerah-daerah yang seharusnya terlah terentaskan justru masih termasuk dalam katagori tertinggal.

Daerah terentaskan versi perhitungan tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat satu daerah yang seharusnya terentaskan dari ketertinggalan, tapi masih termasuk dalam katagori daerah tertinggal dalam rilis kementerian. Pada wilayah Sulawesi dan Maluku Papua terdapat 3 kabupaten/kota yang seharusnya termasuk dalam katagori tertinggal, tapi dalam rilisnya termasuk dalam katagori terentaskan. Daerah-daerah ini adalah Kabupaten Maluku Tenggara, Fakfak, dan Jayapura. Pada wilayah Sumatera justru terdapat daerah yang masuk dalam katagori tertinggal, tapi seharusnya berada dalam katagori terentaskan.

Pada tahun 2014, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat 66 kabupaten/kota tanpa pemekaran yang masih tercatat dalam kategori tertinggal. Akan tetapi hasil perhitungan dengan metode dan data yang sama justru menunjukkan terdapat 31 daerah yang seharusnya termasuk dalam katagori tertinggal, tapi justru masuk dalam katagori daerah yang terentaskan. Adanya perbedaan penetapan ini terutama terjadi di wilayah Sumatera yang mana terdapat 14 kabupaten yang seharusnya termasuk dalam katagori tertinggal. Penetapan daerah tertinggal di wilayah lainnya, selain Jawa juga menunjukkan adanya indikasi daerah tertinggal yang dipaksakan untuk masuk ke dalam katagori daerah yang terentaskan. Oleh karenanya apabila dilihat pada kolom daerah yang terentaskan, maka terjadi perbedaan yang sangat besar pada daerah-daerah yang terentaskan, terutama di wilayah Sumatera.

Tabel 6 Perbedaan Kategorisasi Daerah Tertinggal dan Terentaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Hasil Perhitungan

No	Katagori	Jumlah Daerah Tertinggal	
		2009	2014
I	*Daerah Tertinggal*	*-1*	*31*
	Sumatera	-2	14
	Jawa	-2	-3
	Bali Nusa Tenggara	0	3
	Kalimantan	0	6
	Sulawesi	1	7
	Maluku Papua	2	4
II	*Daerah Terentaskan*	*1*	*-29*
	Sumatera	2	-15
	Jawa	2	1
	Bali Nusa Tenggara	0	-3
	Kalimantan	0	-4
	Sulawesi	-1	-6
	Maluku Papua	-2	-2

Sumber: Hasil Analisis, 2016
Keterangan: negatif menunjukkan daerah hasil perhitungan lebih rendah daripada penetapan Kementerian

Tabel berikut menjelaskan daerah-daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2009, tapi menurut perhitungan yang dilakukan oleh penulis daerah-daerah ini justru telah termasuk dalam katagori daerah yang terentaskan. Terdapat 14 kabupaten/kota yang termasuk dalam daftar ini. Daerah-daerah ini paling banyak berada di Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu, yakni Kabupaten Kapahiang, Lebong, dan Muko-Muko. Pada wilayah timur Indonesia, seperti Maluku Papua, tidak ada daerah tertinggal versi kementerian, tapi berdasarkan datanya menunjukkan terentaskan.

Tabel 7 Daftar Daerah Tertinggal Versi Kementerian dan Daerah Terentaskan Versi Perhitungan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	2009	
			Kemendes	Perhitungan
1	Aceh Besar	Aceh	Tertinggal	Terentaskan
2	Kapahiang	Bengkulu	Tertinggal	Terentaskan
3	Lebong	Bengkulu	Tertinggal	Terentaskan
4	Mukomuko	Bengkulu	Tertinggal	Terentaskan
5	Dharmas Raya	Sumatera Barat	Tertinggal	Terentaskan
6	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Tertinggal	Terentaskan
7	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Tertinggal	Terentaskan
8	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	Tertinggal	Terentaskan
9	Garut	Jawa Barat	Tertinggal	Terentaskan
10	Sukabumi	Jawa Barat	Tertinggal	Terentaskan
11	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Tertinggal	Terentaskan
12	Malinau	Kalimantan Timur	Tertinggal	Terentaskan
13	Majene	Sulawesi Barat	Tertinggal	Terentaskan
14	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Tertinggal	Terentaskan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Sebaliknya, juga terdapat daerah-daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai daerah yang telah terentaskan pada tahun 2009, tapi menurut data statistik justru menunjukkan bahwa daerah-daerah ini justru masih termasuk dalam katagori tertinggal. Terdapat 13 daerah yang termasuk dalam daftar ini yang berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Tengah, Lampung, Malaka, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan terdapat daerah-daerah yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam katagori terentaskan, meskipun secara data justru menunjukkan sebaliknya.

Tabel 8 Daftar Daerah Terentaskan Versi Kementerian dan Daerah Tertinggal Versi Perhitungan Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	2009	
			Kemendes	Perhitungan
1	Aceh Tamiang	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
2	Aceh Utara	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
3	Bengkulu Selatan	Bengkulu	Terentaskan	Tertinggal
4	Rejang Lebong	Bengkulu	Terentaskan	Tertinggal
5	Lampung Timur	Lampung	Terentaskan	Tertinggal
6	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Terentaskan	Tertinggal
7	Katingan	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Tertinggal
8	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Tertinggal
9	Bone Bolango	Gorontalo	Terentaskan	Tertinggal
10	Sinjai	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Tertinggal
11	Kolaka	Sulawesi Tenggara	Terentaskan	Tertinggal
12	Maluku Tenggara	Maluku	Terentaskan	Tertinggal
13	Jayapura	Papua	Terentaskan	Tertinggal

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Pada tahun 2014, masih terdapat daerah-daerah yang seharusnya termasuk dalam kategori daerah terentaskan, tapi dalam rilis kementerian masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Wilayah-wilayah yang termasuk dalam daftar ini sebagian besar berada di Pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Pandeglang, Bondowoso, dan Situbondo yang menjelaskan bahwa seharusnya semakin sedikit wilayah di Jawa yang termasuk dalam katagori daerah tertinggal. Hal ini juga menjelaskan bahwa dengan mengacu pada data sesungguhnya, pembangunan memang berada dan berpusat di Pulau Jawa. Selain tiga kabupaten tersebut, dua wilayah lainnya berada di Kabpaten Mamuju Utara dan Banyu Asin.

Tabel 9 Daftar Daerah Tertinggal Versi Kementerian dan Daerah Terentaskan Versi Perhitungan Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	2014	
			Kemendes	Perhitungan
1	Banyu Asin	Sumatera Selatan	Tertinggal	Terentaskan
2	Pandeglang	Banten	Tertinggal	Terentaskan
3	Bondowoso	Jawa Timur	Tertinggal	Terentaskan
4	Situbondo	Jawa Timur	Tertinggal	Terentaskan
5	Mamuju Utara	Sulawesi Barat	Tertinggal	Terentaskan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa dari sisi pembagian wilayah pulau, terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal penetapan daerah yang terentaskan di Indonesia pada tahun 2014 yang mana terdapat daerah yang ditetapkan sebagai daerah terentaskan, tapi menurut data yang ada, justru masih termasuk dalam katagori daerah tertinggal. Tabel berikut memberikan daftar daerah-daerah tertinggal dan terentaskan yang berbeda menurut versi kementerian dan perhitungan. Wilayah-wilayah dalam daftar ini sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode 2009-2014 ternyata belum benar-benar mampu menggeser pembangunan dari barat ke timur Indonesia, sehingga meskipun terdapat 21 kabupaten yang terentaskan di wilayah ini, tapi ternyata belum terentaskan dari sisi data pendukungnya. Kondisi ini juga mengimplikasikan adanya lobi politik dalam penetapan daerah tertinggal, sehingga meskipun suatu wilayah seharusnya masih termasuk dalam kategori

tertinggal, tapi masih dipaksakan terentaskan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tidak bias barat.

Meskipun terdapat banyak perbedaan dalam penetapan daerah tertinggal dan terentaskan versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta hasil perhitungan peneliti, juga terdapat daerah-daerah yang benar-benar terentaskan, tidak hanya dari rilis kementerian, tapi juga dari data statistiknya. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang mampu mengentaskan daerahnya pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 tidak terjadi perubahan status ketertinggalan wilayahnya. Daerah-daerah yang benar-benar terentaskan pada tahun 2009 ini sebagian besar berada di kawasan barat Indonesia, yakni sebanyak 18 kabupaten/kota, sementara 11 kabupaten/kota berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini juga menunjukkan argumen bahwa pengentasan daerah tertinggal masih cenderung berada di wilayah barat Indonesia. Sementara pada wilayah timur, khususnya Maluku Papua, pengentasan ketertinggalannya justru lambat.

Tabel 10 Daftar Daerah Tertinggal dan Terentaskan Versi Kementerian dan Daerah Tertinggal Versi Perhitungan Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	2014	
			Kemendes	Perhitungan
1	Aceh Barat Daya	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
2	Aceh Selatan	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
3	Aceh Tamiang	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
4	Aceh Utara	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
5	Gayo Lues	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
6	Nagan Raya	Aceh	Terentaskan	Tertinggal
7	Bangka Selatan	Bangka Belitung	Terentaskan	Tertinggal
8	Kaur	Bengkulu	Terentaskan	Tertinggal
9	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Terentaskan	Tertinggal
10	Pasaman	Sumatera Barat	Terentaskan	Tertinggal
11	Solok Selatan	Sumatera Barat	Terentaskan	Tertinggal
12	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	Terentaskan	Tertinggal
13	Lampung Timur	Lampung	Terentaskan	Tertinggal
14	Lampung Utara	Lampung	Terentaskan	Tertinggal
15	Way Kanan	Lampung	Terentaskan	Tertinggal
16	Sumbawa Barat	NTB	Terentaskan	Tertinggal
17	Flores Timur	NTT	Terentaskan	Tertinggal
18	Sikka	NTT	Terentaskan	Tertinggal
19	Sanggau	Kalimantan Barat	Terentaskan	Tertinggal
20	Sekadau	Kalimantan Barat	Terentaskan	Tertinggal
21	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Tertinggal
22	Katingan	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Tertinggal
23	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Tertinggal
24	Sukamara	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Tertinggal
25	Mamasa	Sulawesi Barat	Terentaskan	Tertinggal
26	Selayar	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Tertinggal
27	Buol	Sulawesi Tengah	Terentaskan	Tertinggal
28	Poso	Sulawesi Tengah	Terentaskan	Tertinggal
29	Kolaka	Sulawesi Tenggara	Terentaskan	Tertinggal
30	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	Terentaskan	Tertinggal
31	Bone Bolango	Gorontalo	Terentaskan	Tertinggal
32	Pohuwato	Gorontalo	Terentaskan	Tertinggal
33	Maluku Tenggara	Maluku	Terentaskan	Tertinggal
34	Halmahera Tengah	Maluku Utara	Terentaskan	Tertinggal
35	Jayapura	Papua	Terentaskan	Tertinggal
36	Kaimana	Papua Barat	Terentaskan	Tertinggal

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tabel 11 Daftar Daerah Terentaskan Versi Kementerian dan Perhitungan 2009 dan 2014

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	2009		2014	
			Kemendes	Perhitungan	Kemendes	Perhitungan
1	Aceh Tengah	Aceh	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
2	Bireun	Aceh	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
3	Karang Asem	Bali	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
4	Belitung	Bangka Belitung	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
5	Belitung Timur	Bangka Belitung	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
6	Dairi	Sumatera Utara	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
7	Samosir	Sumatera Utara	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
8	Kuantan Singingi	Riau	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
9	Rokan Hulu	Riau	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
10	Sarolangun	Jambi	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
11	Gunung Kidul	DIY	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
12	Kulon Progo	DIY	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
13	Banjarnegara	Jawa Tengah	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
14	Rembang	Jawa Tengah	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
15	Wonogiri	Jawa Tengah	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
16	Madiun	Jawa Timur	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
17	Pacitan	Jawa Timur	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
18	Trenggalek	Jawa Timur	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
19	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
20	Lamandau	Kalimantan Tengah	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
21	Bantaeng	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
22	Barru	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
23	Bulukumba	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
24	Enrekang	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
25	Luwu	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
26	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
27	Pinrang	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
28	Takalar	Sulawesi Selatan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan
29	Fakfak	Papua Barat	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan	Terentaskan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tabel berikut menggambarkan pengentasan daerah tertinggal pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2009 masih termasuk dalam katagori tertinggal. Daftar ini tidak hanya dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tapi juga didukung dengan data-data statistik. Terdapat 15 kabupaten/kota yang termasuk dalam daftar ini dan sebagian besar juga masih berfokus di wilayah barat Indonesia. Hanya 4 kabupaten/kota di timur Indonesia yang benar-benar terentaskan pada tahun 2014, yakni Kabupaten Mimika, Pangkajene Kepulauan, Banggai, serta Konawe Selatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ini pengentasan daerah tertinggal juga masih banyak berada di wilayah barat, sehingga hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antara barat dan timur.

Tabel 12 Daftar Daerah Tertinggal tahun 2009 dan Daerah Terentaskan tahun 2014 versi Kementerian dan Perhitungan

Kabupaten/Kota	Provinsi	2009		2014	
		Kemendes	Perhitungan	Kemendes	Perhitungan
Aceh Barat	Aceh	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
Aceh Jaya	Aceh	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
Aceh Timur	Aceh	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
Bener Meriah	Aceh	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
Simeulue	Aceh	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan

6	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
7	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
8	Sawah Lunto/Sijunjung	Sumatera Barat	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
9	Solok	Sumatera Barat	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
10	OKU Selatan	Sumatera Selatan	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
11	Pamekasan	Jawa Timur	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
12	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
13	Banggai	Sulawesi Tengah	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
14	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan
15	Mimika	Papua	Tertinggal	Tertinggal	Terentaskan	Terentaskan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar berikut menggambarkan adanya perbedaan penetapan daerah terentaskan dan tertinggal antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahun 2009, kesesuaian penetapan, baik daerah tertinggal maupun daerah terentaskan tinggi mengingat sebagian besar penetapan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Hanya terdapat beberapa daerah, terutama di Kalimantan dan Sumatera yang penetapannya tidak sesuai. Lalu pada tahun 2014, ketidaksesuaian antara penetapan daerah tertinggal dan daerah terentaskan semakin tinggi, terutama di Pulau Sumatera. Menurut rilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pengentasan daerah tertinggal di Sumatera sangat tinggi, tapi pada kenyataannya terdapat daerah-daerah yang masih termasuk dalam katagori tertinggal versi perhitungan. Hal ini menunjukkan semakin tingginya dinamika dalam pengentasan daerah tertinggal di Indonesia, sehingga pengentasan daerah tertinggal tidak hanya didasarkan murni dari sisi teknokratis-nya saja, tapi juga terdapat faktor lain, seperti dari sisi politisnya juga.

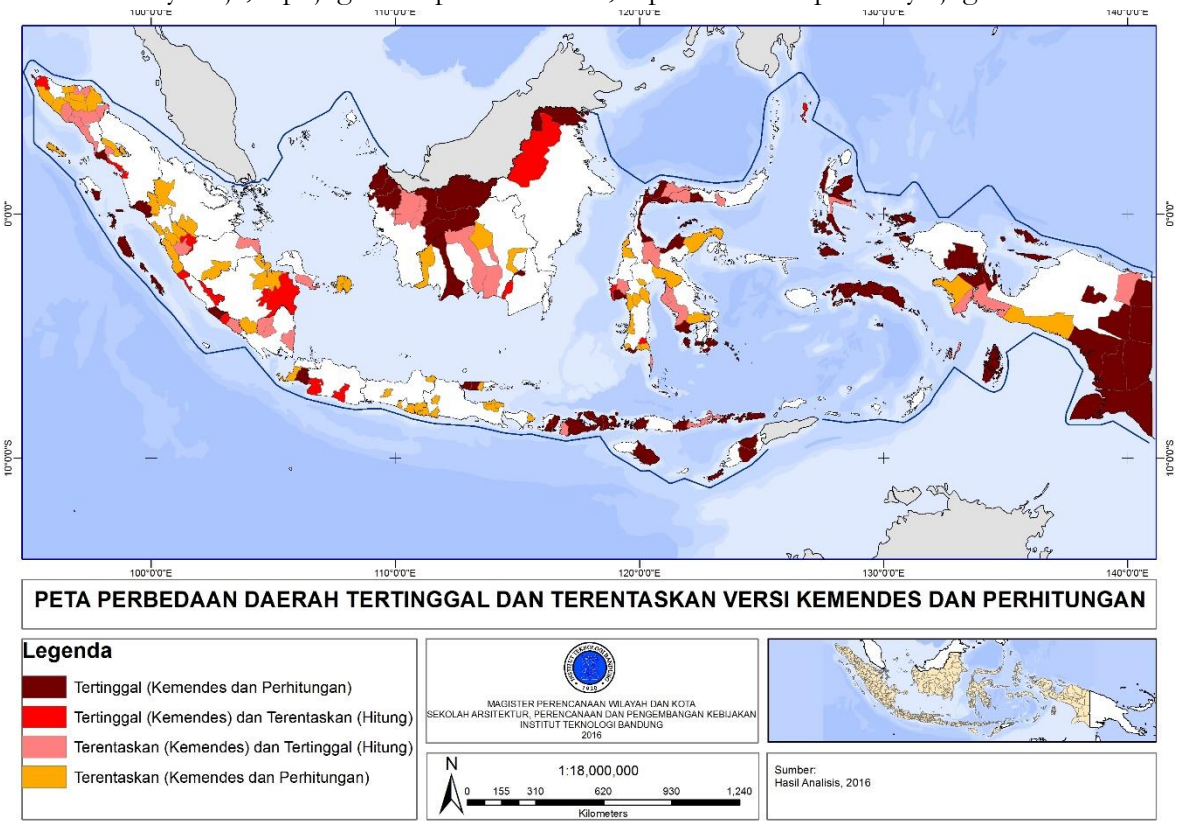

Gambar 4 Peta Perbedaan Daerah Terentaskan dan Tertinggal Versi Kementerian Desa, Pembangunan dan Tertinggal, dan Transmigrasi serta Perhitungan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Pada dasarnya penelitian ini berupaya untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan di daerah tertinggal. Penjelasan di atas menunjukkan tingginya dinamika dalam penentuan daerah tertinggal dan terentaskan, sehingga daerah yang di klaim sebagai daerah terentaskan ternyata tidak benar-benar terentaskan, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya daerah-daerah yang tidak sesuai dalam penetapan tertinggal atau terentaskan dari kementerian atau pun perhitungan harus dihilangkan, sehingga penelitian ini hanya akan melihat pada daerah-daerah yang benar-benar terentaskan dari rilis Kementerian dan perhitungan. Selain itu penelitian ini juga akan mengambil pada wilayah-wilayah yang terentaskan pada tahun 2014, sehingga terdapat 15 kabupaten/kota yang termasuk di dalamnya.

3. ANALISIS PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL DAN TERENTASKAN

3.1 Analisis Persebaran Daerah Tertinggal

Dalam Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, telah diidentifikasi sebanyak 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Dari 199 daerah tertinggal ini, sebanyak 36 kabupaten mengalami pemekaran, sehingga hanya 163 daerah tertinggal yang tidak mengalami pemekaran. Sebagian besar daerah tertinggal ini berada pada Kawasan Timur Indonesia, yakni 96 kabupaten atau 58,89% dari total daerah tertinggal non pemekaran di Indonesia. Sementara pada Kawasan Barat Indonesia, prosentasenya sebesar 41,11%. Prosentase daerah tertinggal yang terfokus di timur Indonesia ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia sebanyak 78 kabupaten/kota atau sebesar 66.66% dari total daerah tertinggal di tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2014, prosentase daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia juga mengalami peningkatan hingga mencapai 76,29% dari total daerah tertinggal di Indonesia.

Dari sisi tingkat penurunan daerah tertinggal sendiri, daerah tertinggal yang berada di Kawasan Timur Indonesia memiliki laju penurunan yang jauh lebih rendah daripada Kawasan Barat Indonesia. Pada tahun 2004-2009, laju penurunan daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,75% atau mampu mengentaskan 18 kabupaten di wilayah timur. Sementara di wilayah barat, penurunan daerah tertinggalnya sangat tinggi, yakni mencapai 41,79% atau 28 kabupaten. Pada periode 2009-2014, meskipun laju penurunan daerah tertinggal rata-rata mengalami penurunan sebesar 11,11% menjadi 17,09%, tapi laju penurunan tertinggi tetap berada di wilayah barat Indonesia sebesar 41,03%. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan daerah tertinggal di wilayah timur yang mana laju penurunannya hanya sebesar 5,13% yang artinya dalam rentang waktu 2009-2014, wilayah timur hanya mampu mengentaskan 4 kabupaten saja. Hal ini menyebabkan daerah tertinggal semakin terkonsentrasi di wilayah timur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah tertinggal di Indonesia meskipun secara jumlah mengalami penurunan tiap tahun, tapi ternyata ketimpangan antar wilayah masih sangat tinggi yang ditunjukkan dengan konsentrasi daerah tertinggal yang sangat tinggi di wilayah timur Indonesia, tidak hanya dari jumlah, tapi laju penurunannya juga rendah. Sementara pada Kawasan Barat Indonesia, konsentrasi daerah tertinggal terus mengalami penurunan dengan laju yang cepat.

Tabel 13 Daerah Tertinggal Menurut Kawasan

Katagori	Tahun			Tingkat Penurunan Daerah Tertinggal (%)	
	2004	2009	2014	2004-2009	2009-2014
Kawasan Barat Indonesia	67	39	23	(41.79)	(41.03)
Kawasan Timur Indonesia	96	78	74	(18.75)	(5.13)
Total	163	117	97	(28.22)	(17.09)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Apabila dilihat menurut kategorisasi pulau, maka daerah tertinggal terkonsentrasi di Pulau Sumatera dengan jumlah 50 kabupaten atau sebesar 30,67% dari total daerah tertinggal di Indonesia dan diikuti dengan Pulau Sulawesi sebanyak 32 kabupaten/kota (19,63%) pada tahun 2004. Adapun konsentrasi daerah tertinggal terendah pada tahun yang sama berada di Kepulauan Maluku dengan prosentase sebesar 5,52%. Selanjutnya, meskipun pada tahun 2004 konsentrasi daerah tertinggal berada di Pulau Sumatera, tapi pada tahun-tahun berikutnya, wilayha ini mampu mengentaskan ketertinggalan wilayahnya dengan laju yang cepat, bahkan mencapai 37,50% per tahun pada periode 2009-2014. Begitu pula dengan Pulau Jawa yang dari awal hanya memiliki sedikit daerah tertinggal juga mampu dengan cepat menurunkan prosentase daerah tertinggalnya mencapai lebih dari 57%.

Sementara itu pada pulau-pulau lainnya yang berada di Kawasan Timur Indonesia, meskipun secara jumlah agregat mengalami penurunan, tapi secara proporsi justru mengalami peningkatan. Hanya pada Pulau Sulawesi yang mampu menurunkan proporsi wilayahnya yang termasuk dalam predikat daerah tertinggal. Proporsi daerah tertinggal di Sulawesi mengalami penurunan dari 19,63% pada tahun 2004 menjadi 18,80% pada tahun 2009, dan 17,53% pada tahun 2014. Pada Pulau Sulawesi ini laju penurunan daerah tertinggalnya lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di wilayah timur Indonesia.

Kondisi yang dialami oleh Pulau Sulawesi tersebut tidak dialami oleh pulau-pulau lainnya yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Proporsi daerah tertinggalnya terhadap Indonesia terus mengalami kenaikan juga laju penurunan daerah tertinggalnya rendah. Semisal pada Pulau Papua yang memiliki proporsi daerah tertinggal sebesar 15,38% (18 kabupaten) pada tahun 2004 menjadi 17,53% (17 kabupaten) dengan laju penurunan yang hanya berkisar 5,56% pada periode 2009-2014. Contoh lain adalah di Pulau Kalimantan yang mana meskipun pada tahun 2004 hingga 2009 mampu mengentaskan 6 kabupaten, tapi pada tahun 2014 justru terdapat 2 daerah baru yang masuk dalam katagori tertinggal. Hal ini memperkuat argument bahwa daerah tertinggal masih sangat terfokus pada wilayah-wilayah timur Indonesia dan pengentasannya masih terkonsentrasi di wilayah Barat Indonesia, sehingga hal ini justru menimbulkan *misconception* bahwa daerah yang membutuhkan banyak bantuan, tapi nyatanya justru daerah yang lebih maju yang mendapatkan bantuan.

Tabel 14 Daerah Tertinggal Menurut Pulau

Katagori	Tahun			Tingkat Penurunan Daerah Tertinggal	
	2004	2009	2014	2004-2009	2009-2014
Sumatera	50	32	20	(36.00)	(37.50)
Jawa	17	7	3	(58.82)	(57.14)
Bali Nusa Tenggara	17	16	16	(5.88)	-
Kalimantan	19	13	15	(31.58)	15.38
Sulawesi	32	22	17	(31.25)	(22.73)
Maluku	9	9	9	-	-
Papua	19	18	17	(5.26)	(5.56)
Total	163	117	97	(28.22)	(17.09)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 3.1 menggambarkan peta perkembangan daerah tertinggal pada tahun 2004, 2009, dan 2014 beserta letak kota-kota yang ada di Indonesia. Dapat diketahui bahwa ketertinggalan wilayah di Indonesia masih didominasi di wilayah timur Indonesia yang mana

lebih dari 80% kabupaten/kotanya mengalami ketertinggalan. Hal ini tentu berbeda dengan wilayah barat Indonesia yang ketertinggalannya sangat rendah, dibawah 20% dari total kabupaten/kota, bahkan di Pulau Jawa hanya terdapat 17 kabupaten/kota tertinggal atau hanya 10,43% pada tahun 2004. Tingginya konsentrasi daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia sebagai konsekuensi dari pembangunan yang lebih perpihak pada efisiensi dibandingkan pada pemerataan, terutama di era Orde Baru yang memfokuskan pembangunan di pusat pertumbuhan, khususnya di Pulau Jawa. Setelah Orde Baru tumbang dan digantikan dengan era Otonomi Daerah, hal ini masih belum banyak berubah. Kondisi ini bisa terlihat dari stuktur ekonomi yang masih berfokus pada pertanian dan kegiatan ekstraktif, sehingga belum banyak memberikan nilai tambah pada wilayah dan justru mengarahkan pada eksploitasi sumber daya alam yang semakin parah. Perkembangan industri masih sangat berfokus di wilayah barat Indonesia, terutama Jawa yang menyumbang lebih dari 85% dari total industri di Indonesia, sementara di wilayah timur prosentasenya kurang dari 5% dari total industri di seluruh Indonesia. Bahkan dalam rencana pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah, seperti RPJPN, RPJMN, RTRW Nasional, MP3EI, pembangunan juga masih bias di Jawa yang dapat dilihat dari proyek-proyek pemerintah bernilai besar yang memberikan *multiplier effect* banyak berada di Pulau Jawa. Sementara pembangunan di wilayah timur lebih diarahkan pada pembangunan sarana untuk memudahkan akses dari tempat produksi kepada tempat distribusi, seperti pelabuhan, bukan kepada lokasi pengolahan terlebih dahulu.

Selain masalah pembangunan yang bias barat Indonesia, konsentrasi daerah tertinggal juga masih terfokus di daerah-daerah perbatasan yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti yang terjadi pada perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia, perbatasan antara Provinsi Papua dan Papua Nugini, serta Provinsi Aceh. Jauhnya lokasi dari pusat pertumbuhan serta rendahnya aksesibilitas menyebabkan pembangunan di daerah ini terhambat. Selain itu orientasi pembangunan yang berfokus di pusat pertumbuhan ini nyatanya juga berdampak pada rendahnya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan, sehingga wilayah perbatasan tidak hanya lemah dari sisi ekonomi, tapi juga kualitas masyarakatnya. Bahkan pada beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Entikong, penyediaan sarana prasarananya justru ditopang oleh negara tetangga, yakni Malaysia.

Daerah-daerah tertinggal di Indonesia, berdasarkan peta perkembangan tersebut, bukan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi justru daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, semisal di Provinsi Papua yang memiliki sumber daya pertambangan emas berlimpah, yakni di Timika, tapi pada kenyataannya keberadaan industri pertambangan skala global tersebut belum mampu mengentaskan ketertinggalan wilayahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di Timika dikuasai dan dieksploitasi oleh kelompok tertentu, sehingga meskipun pemerintahan telah terdesentralisasi yang diharapkan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut, tapi pada kenyataannya wilayah tersebut tetap mengalami kemiskinan. Hal ini tidak hanya terjadi di Papua, tapi beberapa wilayah lainnya seperti Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki potensi tambang tembaga dan emas, tapi dampak kepada masyarakat lokal masih rendah.

Berdasarkan peta tersebut, dapat diketahui bahwa penurunan ketertinggalan tertinggi berada di Pulau Sumatera yang mana dari tahun 2004 hingga 2014 telah mengentaskan 30 kabupaten/kota dan disusul dengan Sulawesi yang telah mengentaskan 15 kabupaten/kota hingga tahun 2014. Pengentasan ketertinggalan wilayah di timur Indonesia khususnya di Maluku Papua perkembangannya sangat lambat dan berfokus pada wilayah-wilayah yang

berada di sekitar perkotaan, sehingga indikasi penyebab keluarnya ketertinggalan adalah sebagai perluasan dari kawasan perkotaan sendiri serta adanya penjalaran aktivitas ekonomi ke pinggiran. Adanya lokasi yang dekat dengan kota ini juga berimplikasi pada semakin banyaknya proyek pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan wilayah pinggiran dengan pusat kota. Hal ini bisa terlihat di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireun yang pada tahun 2009 telah terentaskan dari predikat daerah tertinggal.

Selanjutnya, kedekatan terhadap perkotaan menjadi salah satu faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap persebaran daerah tertinggal. **Error! Reference source not found.** m emberikan gambaran perkembangan daerah tertinggal yang di*overlay*-kan dengan kota-kota di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2004, hampir 40% daerah tertinggal di Indonesia berada di sekitar kawasan perkotaan, sehingga dapat diilustrasikan bahwa di tengah-tengah pembangunan kawasan perkotaan, tapi di sekelilingnya terdapat daerah-daerah yang masih tertinggal. Hal ini sangat terlihat di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, daerah tertinggal yang berada di sekitar wilayah perkotaan mampu terentaskan dari ketertinggalannya, seperti di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu, dan Riau. Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada wilayah-wilayah lainnya, tidak hanya di Kawasan Barat Indonesia lainnya (Pulau Jawa), tapi juga Kawasan Timur Indonesia.

Pada Pulau Jawa kedekatan dengan perkotaan ternyata belum mampu memberikan *multiplier effect* terhadap daerah tertinggal yang berada di sekitarnya. Semisal adanya pusat pertumbuhan di metropolitan Gerbangkertosusilo diharapkan mampu memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya, tapi pada kenyataannya, daerah-daerah tertinggal yang berada di dekatnya, seperti Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo, dan Bondowoso belum mampu keluar dari predikat "daerah tertinggal" dalam periode 2004-2009. Contoh lainnya berada pada metropolitan Jabodetabekpunjur yang merupakan metropolitan terbesar di Indonesia, tapi daerah tertinggal yang tidak jauh dari metropolitan tersebut, yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih tertinggal.

Selanjutnya pada Kawasan Timur Indonesia, wilayah-wilayah perkotaannya sebagian besar dikelilingi oleh daerah tertinggal. Hanya pada Kota Manado dan Balikpapan yang tidak dikelilingi oleh daerah tertinggal. Dalam rentang waktu 2004-2014, daerah tertinggal yang berada di sekeliling kawasan perkotaan tersebut, sebagian besar tidak mampu terentaskan dari ketertinggalannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada Kawasan Timur Indonesia ini, adanya kawasan perkotaan diindikasikan belum mampu memberikan *multiplier effect* terhadap wilayah sekitarnya dikarenakan nilai tambah yang didapat kawasan perkotaan tersebut sangat berbeda dengan yang didapat pada kawasan perkotaan di Pulau Jawa atau Sumatera yang mampu mendorong perluasan wilayah perkotaannya.

Selain itu dapat pula diamati bahwa pada Kawasan Timur Indonesia daerah-daerah yang terentaskan justru berada di wilayah yang cukup jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Pada Pulau Irian Jaya misalnya, terdapat pengentasan pada daerah tertinggal di Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Mimika yang berada jauh dari kota terdekat, yakni Kota Sorong. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan daerah perkotaan tidak menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi persebaran daerah tertinggal, tapi terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh dalam pengentasan daerah tertinggal.

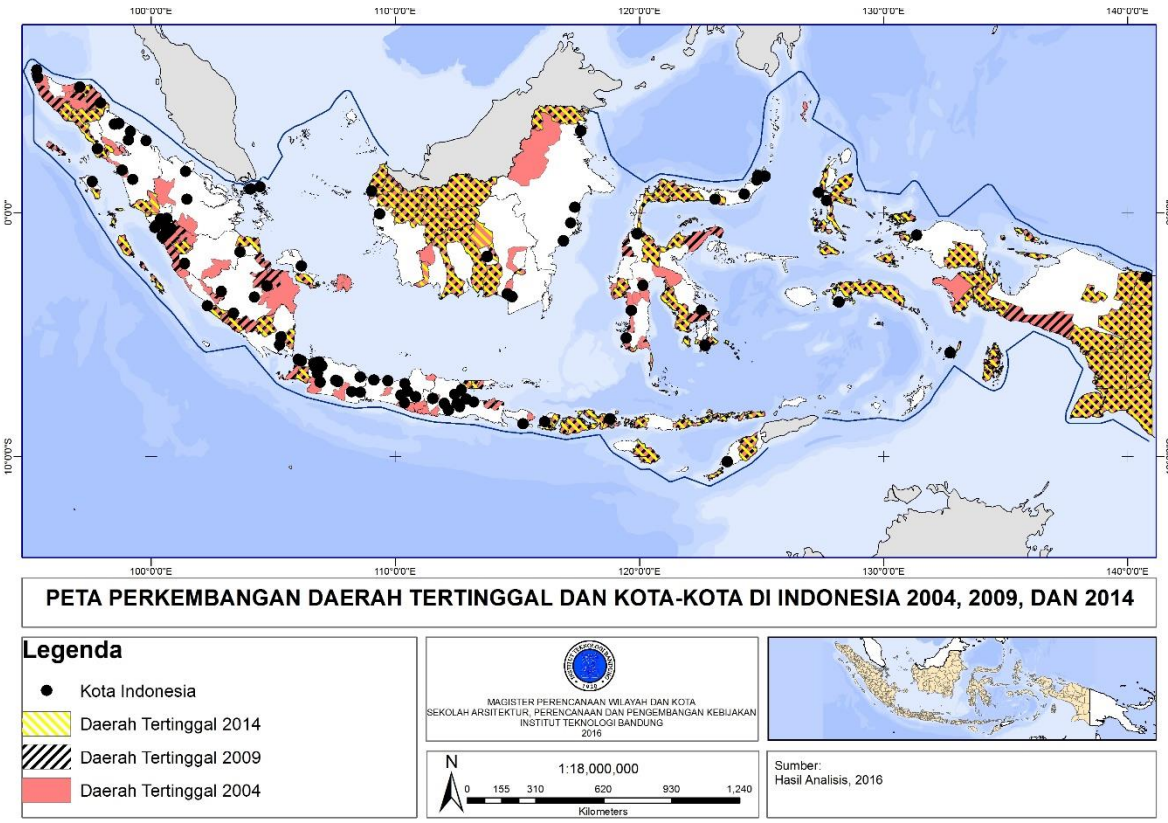

Gambar 5 Peta Perkembangan Daerah Tertinggal 2004, 2009, dan 2014 dan Kota di Indonesia
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Untuk memahami fenomena daerah tertinggal ini secara komprehensif, akan dilihat pada indikator-indikator yang berpengaruh dalam penentuan daerah tertinggal di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan terdapat 6 indikator utama yang berpengaruh terhadap ketertinggalan wilayah, yaitu infrastruktur, aksesibilitas, karakter wilayah, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Indikator yang disusun oleh kementerian tersebut menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai indikator maka tingkat ketertinggalan suatu daerah semakin tinggi pula. Gambar berikut memberikan gambaran rata-rata indeks daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2009 dan 2014. Dapat diketahui bahwa masalah utama dalam daerah tertinggal adalah terkait dengan akses, terutama akses terhadap sarana kesehatan dan pendidikan. Selain aksesibilitas, masalah daerah tertinggal banyak didominasi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Pada tahun 2009 hingga 2014, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia, yakni terdapat peningkatan sebesar 0.0128 dan 0.0071. Di sisi lain juga terdapat isu yang belum diselesaikan di daerah tertinggal, seperti isu aksesibilitas yang menjadi isu utama di daerah tertinggal. Dalam periode 2009 hingga 2014 justru terjadi penurunan aksesibilitas sebesar 0.0107 yang menunjukkan bahwa aksesibilitas justru semakin memburuk.

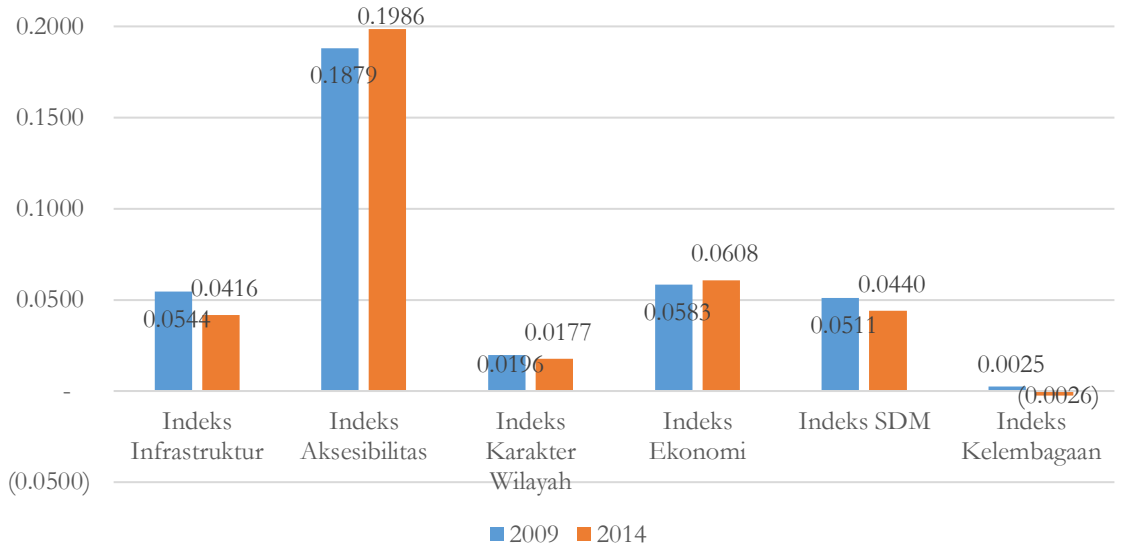

Gambar 6 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal di Indonesia 2009 dan 2014

Sumber: Hasil Analisis

Keterangan: Semakin tinggi nilai indeks, maka ketertinggalan wilayah semakin tinggi

Menurut perwilayahan, pada tahun 2009, terdapat berbagai masalah utama dalam ketertinggalan di tiap wilayah. Pada Pulau Sumatera, masalah ketertinggalan paling tinggi dikarenakan rendahnya kemampuan keuangan daerah serta rendahnya ekonomi di wilayah tersebut. Pada Pulau Jawa, meskipun dari sisi ekonomi dan aksesibilitas tidak termasuk dalam katagori tertinggal tapi ketertinggalan di Jawa diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya masyarakat lokal yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mengembangkan kegiatan ekonominya. Ketertinggalan di Bali Nusa Tenggara diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia serta aksesibilitas dikarenakan bentuk fisik kawasan yang berupa kepulauan. Sementara pada wilayah timur lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, ketertinggalan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas menuju pelayanan publik, sarana kesehatan dan pendidikan yang berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 15 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal Menurut Wilayah 2009

Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
Sumatera	0.0404	0.0446	0.0320	0.0498	(0.0349)	0.0582	0.1901
Jawa	0.1058	(0.0521)	0.0029	(0.0484)	0.2567	(0.0036)	0.2613
Bali Nusa Tenggara	0.0691	0.0768	0.0280	0.0803	0.1347	0.0483	0.4372
Kalimantan	0.0764	0.3203	0.0088	(0.1169)	0.0133	(0.0404)	0.2615
Sulawesi	0.0339	0.1037	0.0150	(0.0070)	0.0136	0.0444	0.2036
Maluku	0.0373	0.2960	0.0224	0.1711	(0.0096)	(0.0025)	0.5148
Papua	0.0603	0.5837	0.0072	0.2406	0.1460	(0.1556)	0.8821

Sumber: Hasil Analisis

Keterangan: Semakin tinggi nilai indeks, maka ketertinggalan wilayah semakin tinggi

Pada tahun 2014, isu ketertinggalan wilayah tidak mengalami banyak berubahan. Pada Pulau Sumatera, meskipun masalah kelembagaan belum mampu teratasi, tapi terdapat permasalahan lainnya yang muncul, yakni ekonomi wilayah yang menyebabkan ketertinggalan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan permasalahan ekonomi, terutama terkait dengan prosentase penduduk miskin serta kemampuan masyarakat untuk melakukan belanja. Pada Pulau Jawa, meskipun pada beberapa indeks mengalami perbaikan, seperti kelembagaan, ekonomi, karakter wilayah, serta infrastruktur, tapi isu sumber daya manusia justru semakin menurun ditunjukkan dengan adanya peningkatan indeks sumber daya manusia dari 0,2567 menjadi 0,2658 yang artinya terdapat penurunan kualitas sumber daya manusia sebesar 0.0091. Pada Bali Nusa Tenggara, sudah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tapi sumber daya manusia masih menjadi masalah utama yang berdampak pada tidak mampunya masyarakat lokal untuk masuk ke dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja lokal rendah, meskipun di wilayah ini terdapat kegiatan ekonomi skala besar, seperti pengembangan kawasan pariwisata. Lalu, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, ketertinggalan masih diakibatkan oleh rendahnya aksesibilitas wilayah, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Permasalahan lain akibat rendahnya aksesibilitas adalah rendahnya peluang masyarakat untuk menggerakkan kegiatan ekonomi wilayah serta kapasitas masyarakat yang masih rendah.

Tabel 16 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal Menurut Wilayah 2014

Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
Sumatera	0.0460	0.0326	0.0264	0.0536	(0.0418)	0.0453	0.1621
Jawa	0.0294	(0.0344)	(0.0152)	(0.0513)	0.2658	(0.0761)	0.1181
Bali Nusa Tenggara	0.0300	0.0538	0.0301	0.0850	0.1190	0.0311	0.3491
Kalimantan	0.0745	0.2841	0.0122	(0.1425)	(0.0005)	(0.0306)	0.1972
Sulawesi	0.0073	0.0885	0.0184	(0.0193)	0.0146	0.0312	0.1406
Maluku	0.0108	0.2594	0.0213	0.1466	(0.0199)	0.0161	0.4342
Papua	0.0713	0.5737	0.0037	0.2804	0.1377	(0.0964)	0.9704

Sumber: Hasil Analisis
Keterangan: Semakin tinggi nilai indeks, maka ketertinggalan wilayah semakin tinggi

Tabel berikut menggambarkan gap rata-rata indeks daerah tertinggal menurut wilayah 2009 dan 2014, sehingga hal ini menggambarkan berapa besar perubahan indeks dalam hal pengentasan ketertinggalan di Indonesia. Semakin rendah nilai gap berarti semakin tinggi perbaikan dalam indeks tersebut, begitu pula sebaliknya. Dalam periode 2009 hingga 2014, pembangunan di daerah tertinggal paling tinggi berada pada pembangunan untuk meningkatkan infrastruktur wilayah serta meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam menjangkau pelayanan publik. Selain infrastruktur dan aksesibilitas, perbaikan indeks ketertinggalan di wilayah Sumatera dan Jawa, serta Bali Nusa Tenggara juga terdapat pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang berarti tingkat kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya semakin meningkat. Akan tetapi hal ini justru belum terjadi di wilayah timur, khususnya di Papua dan Maluku yang mana kemampuan keuangan daerahnya justru mengalami penurunan.

Tabel 17 Gap Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal Menurut Wilayah 2009 dan 2014

Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
Sumatera	0.0056	(0.0120)	(0.0056)	0.0038	(0.0069)	(0.0129)	(0.0279)
Jawa	(0.0764)	0.0177	(0.0181)	(0.0029)	0.0091	(0.0725)	(0.1432)
Bali Nusa Tenggara	(0.0391)	(0.0230)	0.0021	0.0047	(0.0156)	(0.0173)	(0.0882)
Kalimantan	(0.0019)	(0.0362)	0.0034	(0.0256)	(0.0139)	0.0099	(0.0643)
Sulawesi	(0.0266)	(0.0152)	0.0034	(0.0123)	0.0010	(0.0133)	(0.0630)
Maluku	(0.0266)	(0.0365)	(0.0011)	(0.0245)	(0.0103)	0.0185	(0.0805)
Papua	0.0110	(0.0100)	(0.0035)	0.0398	(0.0082)	0.0592	0.0883

Sumber: Hasil Analisis
Keterangan: Semakin rendah nilai gap, maka semakin tinggi perbaikan dalam indeks tersebut

3.2 Analisis Persebaran Daerah Terentaskan di Indonesia

Setelah diidentifikasi pola pada daerah-daerah tertinggal, maka pada bagian ini akan diidentifikasi pola daerah terentaskan di Indonesia. Daerah terentaskan dalam penelitian ini didefinisikan pada daerah-daerah yang mampu keluar dari predikatnya sebagai "daerah tertinggal" yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam penetapan daerah tertinggal, seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, terdapat dinamika yang mana daerah yang ditetapkan sebagai daerah terentaskan, ternyata tidak benar-benar terentaskan dari sisi data statistik yang digunakan dalam perhitungannya. Oleh karenanya daerah yang terentaskan dalam bagian ini merupakan daerah terentaskan dari sisi perhitungan statistik, bukan daerah yang ditetapkan terentaskan oleh kementerian.

Pada tahun 2009, jumlah daerah yang terentaskan dari ketertinggalannya tanpa melalui pemekaran wilayah sebanyak 46 kabupaten dengan rincian 28 kabupaten berada di Kawasan Barat Indonesia dan 16 kabupaten berada di Kawasan Timur Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah daerah yang terentaskan semakin rendah, yakni hanya sebanyak 23 kabupaten yang masih didominasi oleh Kawasan Barat Indonesia, yakni sebanyak 17 kabupaten. Tingkat pengentasan daerah tertinggal sendiri mengalami penurunan, terutama di wilayah timur Indonesia dengan penurunan pengentasan sebanyak 66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengentasan daerah tertinggal ini masih berfokus di wilayah barat Indonesia.

Tabel 18 Daerah Terentaskan Menurut Kawasan

Katagori	2009	2014	Tingkat Kenaikan Daerah Terentaskan 2009-2014
Kawasan Barat Indonesia	28	17	(39.29)
Kawasan Timur Indonesia	18	6	(66.67)
Total	46	23	(50.00)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Apabila diklasifikasikan menurut pulau, maka daerah yang terentaskan sebagian besar berada di wilayah Barat Indonesia, yakni di Pulau Sumatera yang mana pada tahun 2009 mampu mengentaskan 18 kabupaten dan pada tahun 2014 mampu mengentaskan 13

kabupaten lainnya. Pada wilayah-wilayah lainnya, pengentasan daerah tertinggal rendah, terutama di wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku yang mana belum ada wilayah yang benar-benar terentaskan dari ketertinggalannya. Pengentasan ketertinggalan di semua wilayah mengalami penurunan pada tahun 2014, sehingga dapat diindikasikan bahwa program-program yang diimplementasikan pada tahun 2009-2014 kurang berhasil dalam mengentaskan ketertinggalan wilayah. Selain penurunan pengentasan daerah tertinggal, isu daerah terentaskan juga masih banyak berfokus di wilayah barat Indonesia, khususnya Sumatera.

Tabel 19 Daerah Terentaskan Menurut Pulau

Katagori	2009	2014	Tingkat Kenaikan Daerah Terentaskan 2009-2014
Sumatera	18	13	(27.78)
Jawa	10	4	(60.00)
Bali Nusa Tenggara	1	0	(100.00)
Kalimantan	6	0	(100.00)
Sulawesi	10	5	(50.00)
Maluku			-
Papua	1	1	-
Total	46	23	(50.00)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar berikut menjelaskan peta perkembangan daerah terentaskan di Indonesia pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Berdasarkan peta tersebut dapat diamati beberapa hal. *Pertama,* pengentasan daerah tertinggal masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Hal ini bisa dilihat tingkat pengentasan yang tinggi, terutama di Sumatera. Adanya konsentrasi pengentasan di wilayah barat ini juga mengindikasikan bahwa meskipun saat ini pemerintah terus mempromosikan pemerataan pembangunan, terutama ke wilayah timur Indonesia yang selama ini masih tertinggal, tapi pada kenyataannya hal tersebut belum berhasil. Pembangunan tetap berfokus di wilayah barat, sementara wilayah timur tetap tertinggal. *Kedua,* daerah-daerah yang terentaskan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah barat, tapi juga berada pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau memiliki pesisir, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Daerah yang memiliki wilayah pesisir memiliki keunggulan karena mampu memasarkan produk-produk unggulannya melalui laut dan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis potensi laut, hal ini berbeda dengan daerah yang tidak memiliki laut yang mana kegiatan ekonominya cenderung kurang berkembang dan aksesibilitas menuju wilayah ini juga hanya terbatas pada jalur darat. Meskipun demikian, terdapat pula daerah-daerah yang tidak berbatasan dengan laut yang mampu terentaskan, seperti Kabupaten Kuantan Singgigi dan Rokan Hulu di Provinsi Riau.

Selain itu, pengentasan daerah tertinggal juga seringkali dikaitkan dengan kedekatan lokasinya dengan wilayah perkotaan karena wilayah perkotaan diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap wilayah di sekitarnya yang masih tertinggal, sehingga dengan lokasi yang mendekati kota maka wilayah memiliki potensi yang tinggi untuk terentaskan. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, pada tahun 2004, daerah tertinggal banyak berada pada sekitar wilayah perkotaan, sehingga hal ini mengindikasikan ketimpangan pembangunan antara kota dan wilayah *hinterland*-nya. Pada tahun 2009, ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan *hinterland*-nya masih terlihat yang mana daerah tertinggal di sekitar kota masih belum

mampu terentaskan dari ketertinggalannya. Selanjutnya pada tahun 2014, terdapat indikasi *multiplier effect* dari kota ke wilayah *hinterland*-nya yang ditandai dengan semakin banyaknya daerah tertinggal di sekitar kota yang mampu terentaskan, terutama di Sumatera dan Jawa. Akan tetapi hal tersebut hampir tidak terjadi di wilayah timur Indonesia yang mana pengentasan daerah tertinggal justru berada jauh dari wilayah kota, seperti pengetasan ketertinggalan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

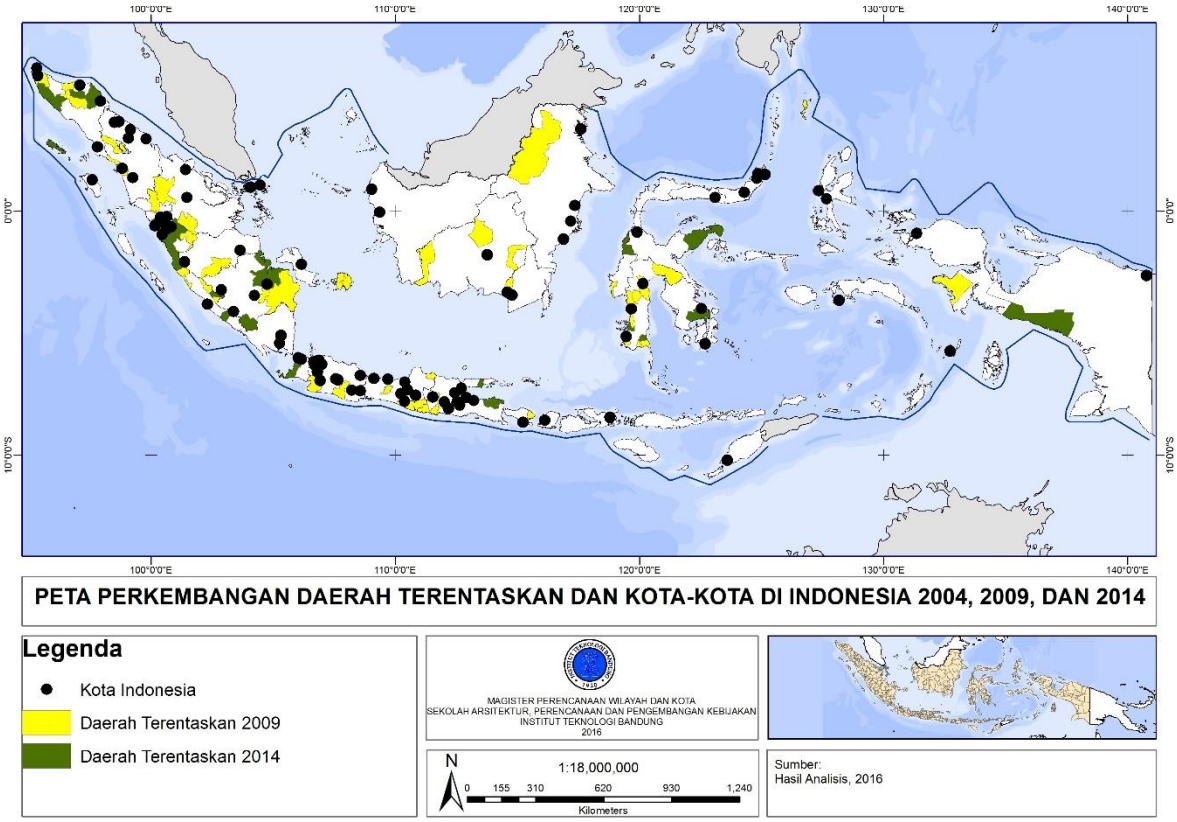

Gambar 7 Peta Perkembangan Daerah Terentaskan dan Kota di Indonesia

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Untuk memahami pengentasan daerah tertinggal ini secara komprehensif, akan dilihat pada indikator-indikator yang berpengaruh dalam pengentasan daerah tertinggal di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan terdapat 6 indikator utama yang berpengaruh terhadap ketertinggalan wilayah, yaitu infrastruktur, aksesibilitas, karakter wilayah, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Indikator yang disusun oeh kementerian tersebut menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai indikator maka tingkat ketertinggalan suatu daerah semakin tinggi pula. Gamber berikut memberikan gambaran rata-rata indeks daerah tertinggal pada daerah terentaskan di Indonesia pada tahun 2009 dan 2014. Dapat diketahui bahwa daerah terentaskan memiliki keunggulan dalam hal ekonomi dan sumber daya manusianya, tetapi masih memiliki kelemahan, yakni terkait dengan infrastruktur dan kelembagaan. Kondisi infrastruktur cenderung masih kurang baik dan kemampuan keuangan daerah juga belum baik. Dalam periode 2009 hingga 2014 dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan kondisi infrastruktur, aksesibilitas, serta sumber daya manusia. Perbaikan sumber daya manusia menjadi salah satu poin yang paling besar dalam

pengentasan daerah tertinggal, yakni dari -0,0846 menjadi -0,1650. Akan tetapi dalam periode tersebut dapat pula diketahui adanya penurunan indikator utama, yakni pada indikator ekonomi yang justru mengalami penurunan sebesar 0,0584. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kegiatan ekonomi wilayah yang diukur dengan prosentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita menurun drastic. Selain ekonomi, karakter bencana (tingkat wilayah yang terkena bencana dan kerentanan lainnya) serta kemampuan keuangan daerah juga mengalami penurunan.

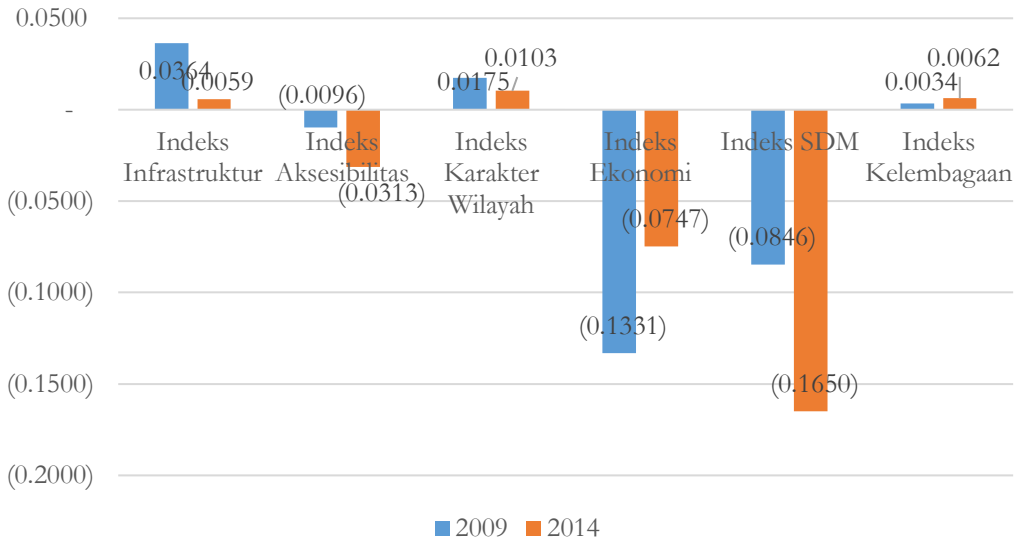

Gambar 8 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan di Indonesia 2009 dan 2014

Sumber: Hasil Analisis

Keterangan: Semakin rendah nilai indeks, maka keterentasan wilayah semakin tinggi

Menurut perwilayahan, pada tahun 2009, daerah terentaskan memiliki keunggulan dalam perhitungan masing-masing indeks. Pada daerah terentaskan yang berada di Pulau Sumatera dan Papua memiliki keunggulan dalam bidang sumber daya manusia yang mampu mengentaskan daerah tertinggal di wilayah ini. Pada Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, pengentasan daerah tertinggal banyak diakibatkan oleh pengaruh ekonomi, baik dari sisi penurunan penduduk miskin maupun peningkatan pengeluaran per kapita. Sementara pada daerah tertinggal di Bali-Nusa Tenggara, yakni Kabupaten Karangasem, pengentasan ketertinggalannya banyak disebabkan oleh adanya peningkatan aksesibilitas wilayah.

Di sisi lain, daerah-daerah yang telah terentaskan ini juga memiliki kelemahan yang mana pada beberapa indikator masih menunjukkan ketertinggalan dengan nilai indeks lebih dari satu. Pada daerah terentaskan yang berada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, daerah yang terentaskan masih mengalami masalah utama di bidang infrastruktur, karakteristik wilayah, serta kemampuan keuangan daerah. Pada daerah erentaskan yang berada di wilayah Bali Nusa Tenggara memiliki kelemahan di bidang sumber daya manusia. Pada wilayah Kalimantan memiliki kelemahan di bidang aksesibilitas dan Papua pada bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat daerah-daerah tertinggal yang terentaskan, tapi ternyata pengentasan ini tidak terjadi pada semua indikator perhitungan daerah tertinggal, sehingga hal ini diindikasikan berpengaruh terhadap capaian pembangunannya.

Tabel 20 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan Menurut Wilayah di Indonesia 2009

Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
Sumatera	0.0276	(0.0149)	0.0048	(0.0869)	(0.0870)	0.0143	(0.0216)
Jawa	0.0621	(0.0992)	0.0453	(0.1776)	(0.0805)	0.0185	(0.1649)
Bali Nusa Tenggara	0.0687	(0.1824)	0.0360	(0.0960)	0.1141	0.0277	(0.0974)
Kalimantan	0.0075	0.1857	0.0306	(0.2203)	(0.0243)	(0.0739)	(0.2111)
Sulawesi	0.0568	(0.0319)	0.0141	(0.1492)	(0.1024)	0.0201	(0.0304)
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Papua	(0.1665)	0.1156	(0.0385)	0.3412	(0.1978)	(0.1528)	(0.0197)

Sumber: Hasil Analisis
Keterangan: Semakin rendah nilai indeks, maka keterentasan wilayah semakin tinggi

Pada tahun 2014, terdapat 23 daerah baru yang terentaskan dari ketertinggalannya. Pada tahun ini, setiap wilayah memiliki perbedaan keunggulan tiap indikator. Wilayah Sumatera tetap memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Wilayah Jawa saat ini memiliki keunggulan pada bidang aksesibilitas, sementara dari sisi ekonomi mengalami penurunan ekonomi lokal yang cukup tinggi. Bali Nusa Tenggara dan Kalimantan memiliki keunggulan dalam hal ekonomi lokal, baik dalam peningkatan pengeluaran per kapita maupun penduduk miskin. Wilayah Sulawesi yang semula unggul dalam hal ekonomi, tapi saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Pulau Papua mengalami peningkatan dalam bidang kemampuan keuangan daerah.

Di sisi lain, pada daerah terentaskan 2014, juga masih memiliki indikator-indikator yang menunjukkan wilayah tersebut masih tertinggal dengan nilai indikator lebih dari 0. Pulau Sumatera dan Sulawesi meskipun terdapat 46 kabupaten yang terentaskan, tapi ternyata kemampuan keuangan daerahnya masih rendah. Pulau Jawa masih memiliki kelemahan di bidang infrastruktur, Bali Nusa Tenggara di bidang sumber daya manusia, Kalimantan di bidang aksesibilitas, dan Papua pada bidang ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam periode 2009-2014 ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketertinggalan pada daerah yang telah mengalami pengentasan.

Tabel 21 Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan Menurut Wilayah di Indonesia 2014

Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
Sumatera	0.0055	(0.0220)	0.0101	(0.0450)	(0.2245)	0.0103	(0.2657)
Jawa	0.0302	(0.1248)	0.0187	(0.0761)	(0.0026)	(0.0056)	(0.1602)
Bali Nusa Tenggara	0.0477	(0.1966)	0.0301	(0.2756)	0.1340	0.0699	(0.1906)
Kalimantan	(0.0085)	0.2991	0.0005	(0.2452)	0.0029	(0.1632)	(0.1144)
Sulawesi	(0.0050)	(0.0250)	0.0184	(0.1105)	(0.3112)	0.0423	(0.3909)
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Papua	(0.0702)	0.1723	(0.0094)	0.2437	(0.1539)	(0.1892)	(0.0066)

Sumber: Hasil Analisis
Keterangan: Semakin rendah nilai indeks, maka keterentasan wilayah semakin tinggi

Tabel berikut menggambarkan gap rata-rata indeks daerah tertinggal pada daerah terentaskan menurut wilayah 2009 dan 2014, sehingga hal ini menggambarkan berapa besar perubahan indeks dalam hal pengentasan ketertinggalan di Indonesia. Semakin rendah nilai gap berarti semakin tinggi perbaikan dalam indeks tersebut, begitu pula sebaliknya. Dalam periode 2009 hingga 2014, daerah terentaskan di tiap wilayah memiliki peningkatan indikator yang berbeda-beda. Pengentasan ketertinggalan di Sumatera dan Sulawesi paling tinggi berada pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengentasan ketertinggalan di Jawa dikarenakan pengurangan kerawanan bencana, Bali Nusa Tenggara dikarenakan peningkatan Konomi, Kalimantan dikarenakan peningkatan kelembagaan, dan Sulawesi dikarenakan peningkatan sumber daya manusia. Akan tetapi secara umum, pada daerah-daerah yang terentaskan ini justru mengalami penurunan dalam bidang ekonomi yang dilihat dari adanya peningkatan kemiskinan pada beberapa wilayah.

Tabel 22 Gap Rata-Rata Indeks Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan Menurut Wilayah di Indonesia 2014 dan 2009

Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
Sumatera	(0.0222)	(0.0071)	0.0053	0.0419	(0.1375)	(0.0040)	(0.2441)
Jawa	(0.0319)	(0.0256)	(0.0266)	0.1014	0.0779	(0.0241)	0.0047
Bali Nusa Tenggara	(0.0210)	(0.0142)	(0.0059)	(0.1796)	0.0199	0.0423	(0.0932)
Kalimantan	(0.0160)	0.1134	(0.0301)	(0.0249)	0.0272	(0.0893)	0.0967
Sulawesi	(0.0619)	0.0070	0.0043	0.0386	(0.2087)	0.0222	(0.3605)
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Papua	0.0963	0.0567	0.0291	(0.0975)	0.0439	(0.0363)	0.0131

Sumber: Hasil Analisis
Keterangan: Semakin rendah nilai gap, maka semakin tinggi perbaikan dalam indeks tersebut

3.3 Sintesa Tipologi Daerah Tertinggal dan Terentaskan di Indonesia

Setelah dianalisis kategorisasi serta pola daerah tertinggal dan terentaskan, maka pada bagian ini berupaya untuk mensintesakan tipologi daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia. Berikut adalah tabel sintesanya.

Tabel 23 Sintesa Tipologi Daerah Tertinggal dan Terentaskan di Indonesia

No	Karakteristik Wilayah	Pola Daerah
1	Wilayah Barat Indonesia Memiliki kawasan pesisir Berada dekat dengan kota	Wilayah ini memiliki keunggulan di bidang aksesibilitas menuju pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kedekatan dengan wilayah perkotaan memudahkan pengembangan ekonomi lokal, sehingga terjadi *trickling down effect* antara kota dengan *hinterland*-nya. Selain itu adanya kawasan pesisir juga meningkatkan potensi kawasan untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan daya saing wilayahnya. Oleh karenanya wilayah dengan karakteristik ini memiliki potensi yang tinggi untuk terentaskan dari ketertinggalannya.
2	Wilayah Barat Indonesia Memiliki kawasan pesisir Berada jauh dengan kota	Wilayah ini juga memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang memadai pula, tapi karakter wilayah ini agak sulit untuk mengembangkan ekonomi lokalnya, terutama untuk membuka pasar ke wilayah yang lebih maju. Selain itu wilayah ini memiliki kelemahan di bidang rendahnya kemampuan keuangan daerah, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Karakteristik wilayah ini mampu terentaskan, tapi apabila aksesibilitas wilayah dan kualitas sumber daya manusia meningkat.

No	Karakteristik Wilayah	Pola Daerah
3	Wilayah Barat Indonesia Tidak memiliki pesisir Berada dekat dengan kota	Wilayah barat Indonesia ini memiliki kelemahan terkait dengan rendahnya aksesibilitas menuju pelayanan publik serta infrastruktur wilayah. Selain itu kemampuan keuangan daerah juga masih lemah. Akan tetapi wilayah ini mampu terentaskan dengan memanfaatkan kedekatan lokasinya dengan wilayah perkotaan sebagai lokasi pemasaran dan peningkatan kegiatan ekonomi lokal di sekitar kota. Wilayah ini juga diuntungkan dengan adanya industri-industri berbasis sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mendorogn pertumbuhan ekonomi.
4	Wilayah Barat Indonesia Tidak memiliki pesisir Berada jauh dengan kota	Wilayah barat ini tidak diuntungkan dengan dengan rendahnya aksesibilitas dan rendahnya infrastruktur. Wilayah ini juga tidak diuntungkan dengan lokasinya yang jauh dari perkotaan, sehingga tidak bisa memanfaatkan unsur kedekatan lokasi dengan perkotaan. Wlilayah ini sulit untuk terentaskan, tapi akan mampu terentaskan jika meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerahnya.
5	Wilayah Timur Indonesia Memiliki kawasan pesisir Berada dekat dengan kota	Meskipun wilayah ini diuntungkan dengan adanya pesisir di wilayahnya dan dekat dengan kota, tapi *multiplier effect* dari kota terhadap daerah tertinggal ini lama dan cenderung menimbulkan hubungan eksploitatif karena sumber daya di daerah tertinggal dikuras untuk membiayai daerah yang lebih maju. Selain itu wilayah ini juga memiliki kelemahan di bidang rendahnya kemampuan keuangan daerah. Wilayah ini mampu terentaskan dengan memanfaatkan kedekatan dengan kota dengan menghilangkan hubungan eksploitatif dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu masuk dalam pasar ekonomi.
6	Wilayah Timur Indonesia Memiliki kawasan pesisir Berada jauh dengan kota	Wilayah Timur Indonesia ini memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia yang cukup memadai, meskipun tidak terlalu tinggi juga. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa wilayah ini masih memiliki masalah di bidang rendahnya aksesibilitas, infrastruktur, ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah. Adanya potensi pesisir dan sumber daya kelautannya belum mampu dimanfaatkan dengan baik di wilayah ini. Oleh karenanya pengentasan daerah tertinggal di wilayah timur dengan karakter ini dapat memanfaatkan potensi pesisir yang ada dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur.
7	Wilayah Timur Indonesia Tidak memiliki pesisir Berada dekat dengan kota	Wilayah ini memiliki kelemahan yang tinggi dalam hal aksesibilitas wilayah, tapi masih memiliki keuntungan karena berada tidak jauh dari kota. Akan tetapi dampak kedekatan lokasi dengan kota ini sulit dirasakan oleh daerah tertinggal karena adanya hubungan eksploitatif dengan kota. Meskipun demikian wilayah ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, sehingga sumber daya manusia ini harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi.
8	Wilayah Timur Indonesia Tidak memiliki pesisir Berada jauh dengan kota	Wilayah timur Indonesia ini memiliki aksesibilitas kepada pelayanan publik yang buruk dan infrastruktur yang buruk pula. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya sumber daya manusia serta rendahnya kegiatan ekonomi yang mampu berkembang di wilayah ini. Selain itu kondisi ini juga berdampak pada rendahnya kemandirian di tingkat lokal. Untuk mengentaskan daerah tertinggal yang berada pada karakter ini dibutuhkan *effort* yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengentasan harus difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dasar serta kualitas sumber daya manusia agar mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Sumber: Hasil Analisis, 2016

4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL

Pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa menurut hasil perhitungan terdapat 23 daerah tertinggal di Indonesia yang terentaskan pada tahun 2014. Akan tetapi telah dijelaskan pula bahwa terdapat dinamika dalam pengentasan daerah tertinggal sendiri. Daerah-daerah yang terentaskan menurut hasil perhitungan ternyata tidak seluruhnya sama dengan rilis daerah terentaskan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Oleh karenanya untuk mengidentifikasi bagaimana daerah-daerah tertinggal ini mampu mengentaskan wilayahnya, maka sebagai bahan analiss, daerah yang akan dianalisis merupakan daerah yang terentaskan tidak hanya dari sisi perhitungan, tapi juga rilis dari kementerian. Adapun daerah-daerah yang terentaskan ini masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia (Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Timur, Bener Meriah, Simeulue, Pamekasan, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Solok, dan OKU Selatan), serta 4 wilayah lainnya berada di wilayah timur Indonesia, yakni Mimika, Pangkajene Kepulauan, Banggai, dan Konawe Selatan.

Tabel berikut menggambarkan hasil penilaian indikator pada tiap indeks utama daerah tertinggal pada daerah-daerah yang telah terentaskan. Pada tahun 2009, daerah-daerah yang terentaskan berikut masih berada dalam katagori daerah tertinggal yang ditunjukkan dengan nilai indeks lebih dari nol. Meskipun demikian terdapat beberapa indeks utama yang telah terentaskan dengan nilai kurang dari nol. Pada daerah tertinggal yang berada di Provinsi Aceh ditandai dengan sebagian besar memiliki keunggulan dalam hal kualitas sumber daya manusianya (kecuali di Simuelue), meskipun demikian sumber daya manusia yang memadai ini belum mampu untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal yang ditandai dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini serta rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat. Kondisi di Sulawesi serta Papua menunjukkan bahwa wilayah ini juga memiliki kualtias sumber daya manusia yang cukup baik, tapi hal ini tidak didukung dengan aksesibilitas yang memadai menuju pusat pemerintahan maupun pelayanan publik kesehatan dan pendidikan. Sementara di Sumatera Barat, ketertinggalan banyak ditunjukkan dengan karakteristik wilayah yang rendah, dalam artian wilayah ini memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, sehingga hal ini menghambat pembangunan wilayah. Padahal, wilayah di Sumatera Barat ini memiliki keunggulan di bidang ekonomi wilayah.

Tabel 24 Indikator Statistik pada tiap Indeks Utama Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan 2009

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
1	Aceh Barat	Aceh	(0.005)	0.028	0.041	0.215	(0.156)	0.090	0.214
2	Aceh Jaya	Aceh	(0.072)	0.067	(0.005)	0.155	(0.107)	0.124	0.163
3	Aceh Timur	Aceh	0.014	(0.053)	0.001	0.226	(0.167)	0.014	0.035
4	Bener Meriah	Aceh	(0.026)	(0.032)	0.012	0.167	(0.093)	0.090	0.117
5	Simeulue	Aceh	(0.058)	0.143	(0.004)	0.023	0.087	0.066	0.258
6	Padang Pariaman	Sumatera Barat	0.040	(0.147)	0.126	(0.016)	0.027	0.084	0.115
7	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	0.036	0.056	0.170	(0.192)	(0.014)	0.035	0.092
8	Sawah Lunto/ Sijunjung	Sumatera Barat	0.043	(0.026)	0.106	(0.203)	0.016	0.084	0.020
9	Solok	Sumatera Barat	0.025	(0.008)	0.103	(0.127)	0.009	0.083	0.087
10	OKU Selatan	Sumatera Selatan	0.117	0.149	(0.021)	(0.041)	(0.105)	0.024	0.124
11	Pamekasan	Jawa Timur	0.067	(0.128)	(0.009)	0.007	0.238	0.039	0.213
12	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	0.056	0.106	0.044	(0.061)	(0.008)	(0.004)	0.132
13	Banggai	Sulawesi Tengah	(0.003)	0.132	(0.005)	(0.037)	(0.077)	(0.008)	0.002
14	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	(0.030)	0.110	(0.027)	0.009	(0.042)	0.038	0.057
15	Mimika	Papua	0.149	0.308	0.023	0.091	(0.059)	(0.419)	0.092

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah nilai indeks, maka keterentasan wilayah semakin tinggi. Warna hijau menjelaskan nilai indikator paling tinggi (paling entas), sementara warna kuning menjelaskan nilai paling rendah (paling tertinggal)

Selanjutnya, tabel berikut menjelaskan indikator hasil penilaian pada daerah terentaskan di tahun 2014. Pada tahun ini, 15 daerah tertinggal yang sebelumnya masih dalam katagori "tertinggal", kini telah terentaskan dari ketertinggalannya yang ditandai dengan nilai total indeks kurang dari nol. Meskipun secara perhitungan total menunjukkan terentaskan, tapi pada beberapa indikator ketertinggalan justru masih menunjukkan tertinggal. Pada daerah terentaskan di Provinsi Aceh tidak mengalami banyak perubahan. Kabupaten yang terentaskan di Aceh memiliki kondisi sumber daya manusia yang tinggi (tertinggi diantara indeks lainnya), seta infrastruktur dan karakter wilayah, tetapi meskipun telah termasuk dalam katagori terentaskan, ternyata daerah-daerah ini belum mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya, yang ditunjukkan dengan nilai indeks diatas nol. Pada daerah-daerah teretaskan lainnya tidak banyak megnalami perubahan dalam indeks yang paling banyak perengaruh dalam hal pengentasan ketertinggalan, semisal di Sumatera Barat, indeks yang paling tinggi adalah ekonomi, tapi wilayah-wilayah di provinsi ini memiliki kelemahan di bidang karakteristik wilayah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi.

Tabel 25 Indikator Statistik pada tiap Indeks Utama Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan 2014

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
1	Aceh Barat	Aceh	(0.078)	(0.028)	0.033	0.172	(0.176)	0.008	(0.068)
2	Aceh Jaya	Aceh	(0.105)	0.014	(0.002)	0.133	(0.098)	0.031	(0.028)
3	Aceh Timur	Aceh	(0.016)	(0.035)	(0.033)	0.169	(0.168)	(0.008)	(0.091)
4	Bener Meriah	Aceh	(0.061)	(0.069)	(0.025)	0.149	(0.101)	0.038	(0.069)
5	Simeulue	Aceh	(0.123)	0.123	0.009	0.083	(3.324)	0.041	(3.192)
6	Pamekasan	Jawa Timur	(0.021)	(0.179)	(0.051)	(0.035)	0.175	(0.023)	(0.133)
7	Padang Pariaman	Sumatera Barat	0.025	(0.179)	0.158	(0.183)	(0.076)	0.013	(0.242)
8	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	0.042	0.040	0.158	(0.185)	(0.064)	(0.002)	(0.010)
9	Sawah Lunto/Sijunjung	Sumatera Barat	0.006	(0.081)	0.099	(0.212)	(0.010)	0.025	(0.173)
10	Solok	Sumatera Barat	0.054	(0.059)	0.161	(0.161)	(0.028)	0.021	(0.013)
11	OKU Selatan	Sumatera Selatan	0.100	0.113	(0.006)	(0.073)	(0.105)	(0.042)	(0.013)
12	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	(0.009)	0.049	0.016	(0.074)	(0.036)	(0.011)	(0.066)
13	Banggai	Sulawesi Tengah	(0.045)	0.103	(0.014)	(0.125)	(0.088)	(0.031)	(0.200)
14	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	(0.048)	0.069	(0.013)	(0.041)	(0.035)	(0.010)	(0.079)
15	Mimika	Papua	0.062	0.269	0.037	0.067	(0.083)	(0.361)	(0.009)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah nilai indeks, maka keterentasan wilayah semakin tinggi. Warna hijau menjelaskan nilai indikator paling tinggi (paling entas), sementara warna kuning menjelaskan nilai paling rendah (paling tertinggal)

Selanjutnya tabel berikut menjelaskan prosentase perubahan indikator statistik pada tiap indeks utama daerah tertinggal pada daerah yang telah terentaskan antara tahun 2009 hingga 2014. Semakin tinggi nilai prosentase perubahan, maka diindikasikan indikator tersebut yang paling berpengaruh terhadap pengentasan ketertinggalan di suatu wilayah. Pada daerah yang terentaskan di Provinsi Aceh, meskipun indikator sumber daya manusia memiliki nilai tertinggi dalam penentuan daerah tertinggal, tapi laju peningkatannya rendah. Hanya pada Kabupaten Simeulue yang memiliki peningkatan sumber daya manusia hingga 39,20%. Laju tertinggi pada indikator-indikator tertinggal di daerah-daerah terentaskan di Provinsi Aceh sangat bervariasi. Pada Kabupaten Aceh Barat misalnya pengentasan ketertinggalan banyak diakibatkan oleh tingginya pembangunan infrastruktur wilayah dan aksesibilitas wilayahnya.

Pada daerah terentaskan yang berada di Jawa, yakni Pamekasan, pengentasan ketertinggalan paling banyak diakibatkan oleh peningkatan kondisi ekonomi wilayah yang ditandai dengan laju peningkatan sebesar 6,06% serta penurunan risiko bencana sebesar 4,70%. Pada daerah terentaskan lain yang berada di wilayah timur, yakni Papua dan Sulawesi, pengentasan ketertinggalan banyak disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang menjadi salah satu permasalahan utama di daerah yang

terentaskan ini. Lalu, pada Provinsi Sumatera Barat, pengentasan tertinggal pada 4 kabupaten/kota paling tinggi berada pada peningkatan aksesibilitas wilayah serta ekonomi dan sumber daya manusia. Adapun peningkatan ekonomi wilayah justru masih rendah, kecuali di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 26 Prosentase Perubahan Indikator Statistik pada tiap Indeks Utama Daerah Tertinggal pada Daerah Terentaskan 2009-2014

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Total
1	Aceh Barat	Aceh	14.059	1.990	0.212	0.199	0.132	0.907	1.320
2	Aceh Jaya	Aceh	0.461	0.796	0.492	0.142	0.082	0.750	1.170
3	Aceh Timur	Aceh	2.125	0.352	57.912	0.251	0.008	1.571	3.626
4	Bener Meriah	Aceh	1.396	1.136	3.164	0.108	0.076	0.581	1.591
5	Simeulue	Aceh	1.132	0.143	3.540	2.598	39.102	0.384	13.372
6	Padang Pariaman	Sumatera Barat	0.368	0.221	0.252	10.746	3.793	0.850	3.105
7	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	0.158	0.280	0.069	0.033	3.467	1.059	1.108
8	Sawah Lunto/ Sijunjung	Sumatera Barat	0.868	2.142	0.062	0.044	1.613	0.699	9.668
9	Solok	Sumatera Barat	1.137	6.876	0.559	0.271	3.933	0.749	1.148
10	OKU Selatan	Sumatera Selatan	0.147	0.243	0.695	0.790	0.000	2.760	1.108
11	Pamekasan	Jawa Timur	1.309	0.396	4.705	6.060	0.263	1.596	1.624
12	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	1.162	0.540	0.645	0.219	3.219	1.686	1.502
13	Banggai	Sulawesi Tengah	13.506	0.220	1.724	2.380	0.155	3.057	85.704
14	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	0.606	0.378	0.530	5.696	0.165	1.273	2.389
15	Mimika	Papua	0.582	0.127	0.625	0.261	0.409	0.138	1.10

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah prosentase kenaikan, maka diindikasikan pengentasan ketetinggalan dikarenakan indikator tersebut. Warna hijau menjelaskan peningkatan indikator tertinggi dan warna kuning menjelaskan penurunan indikator paling besar

4.1 Faktor Infrastruktur

Dalam perhitungan ketertinggalan dari sisi infrastruktur, diamati dari beberapa indikator, seperti jumlah desa dengan jenis permukaan terluas (aspal, diperkeras, tanah, lainnya), prosentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan, jumlah prasarana kesehatan, jumlah dokter per 1000 penduduk, jumlah SD/SMP per 1000 penduduk, prosentase rumah tangga pengguna listrik, prosentase rumah tangga pengguna telepon, serta prosentase rumah tangga pengguna air bersih. Dalam periode 2009-2014, sebagian besar daerah yang terentaskan memiliki kondisi jalan yang diaspal yang ditandai dengan peningkatan prosentase desa dengan jenis permukaan jalan terluas aspal,, sementara pada jenis permukaan jalan lainnya mengalami

penurunan. Pada indikator prosentase desa yang memiliki pasar tanpa bangunan, penurunan paling tinggi berada di Provinsi Aceh dan Sulawesi yang memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi wilayah. Selanjutnya pembangunan sarana prasarana kesehatan paling tinggi berada pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan peningkatan paling tinggi berada di Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Solok. Indikator pendidikan dasar SD dan SMP, peningkatan paling tinggi berada di Kabupaten Simeulue yang semula memiliki masalah dalam bidang kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dari sisi pengguna listrik, peningkatan rumah tangga pengguna paling tinggi berada pada wilayah-wilayah timur Indonesia yang memiliki tingkat elektrifikasi rendah. Begitu pula dengan peningkatan pengguna telepon yang banyak berada di wilayah timur Indonesia.

Tabel 27 Prosentase Peningkatan Indikator Infrastruktur pada Daerah Terentaskan di Indonesia

No	Kabupaten/ Kota	Prosentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Terluas				Prosentase Desa yang mempunyai Pasar Tanpa bangunan Permanen	Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk	Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk	Jumlah SD/SMP Per 1000 Penduduk	Persentase Rumah tangga Pengguna Listrik	Persentase Rumah tangga Pengguna Telepon	Persentase Rumah tangga Pengguna Air Bersih
		Aspal	Diperkeras	Tanah	Lainnya							
1	Aceh Barat	38.03	7.73	(86.09)	(88.92)	(63.75)	104.91	88.23	20.98	24.81	830.45	11.11
2	Aceh Jaya	70.00	(8.06)	(47.62)	(88.89)	(93.10)	71.19	10.44	23.96	50.89	55.91	11.11
3	Aceh Timur	104.71	33.19	(79.09)	(100.00)	(74.71)	30.54	28.45	12.76	14.45	105.29	11.11
4	Bener Meriah	8.56	99.14	530.62	(87.55)	(88.94)	82.96	38.16	7.63	22.65	154.57	11.11
5	Simeulue	75.00	(47.50)	(60.00)	(100.00)	10.63	227.05	57.12	121.29	22.74	48.45	11.11
6	Padang Pariaman	65.06	(91.30)	(100.00)	(100.00)	(52.32)	841.81	26.22	14.86	15.07	(56.12)	11.11
7	Pesisir Selatan	42.31	(88.89)	(100.00)	(100.00)	(17.86)	744.43	51.92	14.84	54.28	(54.21)	11.11
8	Sawah Lunto/ Sijunjung	51.44	(69.18)	(100.00)	(100.00)	(27.01)	398.88	62.90	26.65	33.13	(26.31)	11.11
9	Solok	56.82	(76.19)	(100.00)	(100.00)	(4.35)	441.64	(0.25)	18.36	15.21	(17.46)	11.11
10	OKU Selatan	20.42	58.73	1.71	(100.00)	(33.34)	141.14	(34.14)	27.85	68.58	92.14	11.11
11	Pamekasan	200.00	(51.61)	(100.00)	(100.00)	(66.15)	367.18	16.65	23.95	4.42	261.39	17.65
12	Pangkajene Kepulauan	85.03	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(95.17)	182.72	(3.72)	6.58	18.51	65.98	11.11
13	Banggai	36.67	6.14	66.78	(100.00)	(87.59)	47.00	25.66	26.70	69.32	129.22	11.11
14	Konawe Selatan	31.78	(2.39)	(54.10)	(100.00)	(63.44)	39.30	1.39	21.85	66.36	193.15	11.11
15	Mimika	733.33	200.00	33.33	(50.00)	(78.43)	134.17	86.14	13.28	43.03	350.01	6.38

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah nilai pada indikator prosentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah dan lainnya serta prosentase desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen, maka hal ini berkorelasi positif dengan pengentasan ketertinggalan wilayah. Sementara itu semakin tinggi nilai pada indikator prosentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton, diperkeras; prosentase rumah tangga pengguna telepon, prosentase rumah tangga pengguna listrik, prosentase rumah tangga pengguna air bersih, jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk, jumlah dokter per 1000 penduduk, serta jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk, maka berkorelasi positif terhadap pengentasan katertinggalan.

4.2 Faktor Aksesibilitas

Dalam perhitungan ketertinggalan dari sisi aksesibilitas, dilihat dengan menggunakan tiga indikator, yaitu rata-rata jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kabupaten yang membawahi, prosentase desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih dari 5 kilometer dan akses kepada pelayanan pendidikan dasar (KM). Semakin rendah nilai perubahan indikator, maka akan semakin tinggi pula kaitannya dengan pengentasan ketertinggalan wilayah. Dalam periode 2009 hingga 2014 terjadi peningkatan kondisi aksesibilitas pada 15 daerah terentaskan ini yang ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat untuk menjangkau pemerintahannya, sarana kesehatan, serta pendidikannya. Peningkatan akses terhadap kantor pemerintahannya paling tinggi berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Pangkajene Kepulauan yang mampu menurunkan jarak dari kantor desa ke kantor kabupatennya sebesar 24,07% dan 12,46%. Peningkatan akses terhadap sarana kesehatan paling tinggi berada di Kabupaten Pamekasan, Sawah Lunto, dan Padang Pariaman. Sementara peningkatan pada akses ke pelayanan pendidikan paling tinggi berada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Tabel 28 Prosentase Peningkatan Indikator Aksesibilitas pada Daerah Terentaskan di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Jarak dari Kantor Desa/ Kelurahan Kekantor Kab yang Membawahi (Km)	Akses ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km (Prosentase Desa)	Akses Ke Pelayanan Pendidikan Dasar (Km)
1	Aceh Barat	4.66	(24.15)	(39.27)
2	Aceh Jaya	1.79	(24.60)	(26.11)
3	Aceh Timur	3.91	28.16	(37.75)
4	Bener Meriah	11.43	(20.50)	(19.82)
5	Simeulue	(0.26)	(1.48)	(23.45)
6	Padang Pariaman	(24.07)	(34.75)	-
7	Pesisir Selatan	(7.09)	(2.94)	-
8	Sawah Lunto/Sijunjung	(2.50)	(35.27)	-
9	Solok	0.45	(34.14)	-
10	OKU Selatan	(2.29)	(7.34)	(7.19)
11	Pamekasan	0.80	(54.85)	(12.28)
12	Pangkajene Kepulauan	(12.46)	(15.30)	(100.00)
13	Banggai	-	(28.18)	(6.66)
14	Konawe Selatan	(8.48)	(8.78)	(13.45)
15	Mimika	(1.34)	(1.28)	(51.72)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah nilai, maka hal ini berkorelasi positif dengan pengentasan ketertinggalan wilayah

4.3 Faktor Karakteristik Wilayah

Indeks karakteristik wilayah dilihat dari 7 indikator yang menggambarkan kerentanan wilayah terhadap bencana dan konflik sosial masyarakat, sehingga semakin rendah nilai perubahan indikatornya, maka hal ini akan berkorelasi positif terhadap pengentasan ketertinggalan wilayah. Secara umum daerah yang terentaskan di Indonesia mampu menurunkan indikator karakteristik wilayahnya yang berarti semakin berkorelasi positif terhadap pengentasan ketertinggalan. Penurunan indikator karakteristik wilayah paling tinggi pada indikator prosentase desa yang terkena gempa bumi dan tanah longsor dengan penurunan rata-rata mencapai 50% yang artinya daerah mampu mengurangi kerentanan bencana di wilayahnya. Akan tetapi terdapat beberapa daerah yang justru kerawanan bencananya menglami peningkatan, seperti di Padang Pariaman, Sawah Lunto, serta Solok. Pada indikator desa yang berlahan kritis atau mengalami konflik secara prosentase tidak mengalami perubahan nilai indikatornya.

Tabel 29 Prosentase Peningkatan Indikator Karakteristik Wilayah pada Daerah Terentaskan di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	% Desa Gempa bumi	% Desa Tanah Longsor	% Desa Banjir	% Desa Bencana Lainnya	% Desa di Kawasan Hutan	% Desa berlahan Kritis	% Rata2 Desa Konflik 1 tahun terakhir
1	Aceh Barat	(83.22)	(50.16)	9.14	71.46	33.61	-	-
2	Aceh Jaya	(92.86)	(50.00)	(2.70)	33. 33	63.00	-	-
3	Aceh Timur	(100.00)	(45.45)	(23.89)	(75.90)	41.25	-	-
4	Bener Meriah	(73.80)	(55.58)	(71.55)	(50.21)	25.47	-	-
5	Simeulue	(23.30)	-	13.33	35.00	19.33	-	-
6	Padang Pariaman	-	30.56	0.27	95.83	-	-	-
7	Pesisir Selatan	(9.21)	9.09	(26.67)	(15.63)	13.50	-	-
8	Sawah Lunto/Sijunjung	(91.89)	(12.68)	4.02	131.15	24.24	-	-
9	Solok	(42.00)	76.47	13.33	164.29	24.00	-	-
10	OKU Selatan	-	62.09	61.83	12.64	25.51	-	-
11	Pamekasan	-	(84.00)	(64.71)	(51.47)	-	-	-
12	Pangkajene Kepulauan	-	14. 57	8.03	(28.93)	3.20	-	(100.00)
13	Banggai	39.27	(72.43)	(6.18)	(19.30)	40.31	-	-
14	Konawe Selatan	(49.73)	0.55	33.38	30.71	25.14	-	-
15	Mimika	-	60.00	(57.14)	-	20.47	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah nilai, maka hal ini berkorelasi positif dengan pengentasan ketertinggalan wilayah

4.4 Faktor Ekonomi

Indeks ekonomi dalam penentuan ketertinggalan dilihat dengan dua indikator yakni prosentase penduduk miskin serta pengeluaran konsumsi pe kapita. Secara umum, daerah-daerah yang terentaskan ini mengalami perbaikan kualitas ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya penurunan prosentase penduduk miskin serta

peningkatan pengeluaran per kapita. Penurunan penduduk miskin paling tinggi berada pada Kabupaten Banggai, Konawe Selatan, Aceh Timur. Sementara peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita paling tinggi berada pada Kabupaten Padang Pariaman, Pangkajene Kepulauan, Aceh Timur, dan Bener Meriah. Adapun daerah-dengan tingkat penurunan penduduk miskin terendah dan peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita yang rendah pula berada di Kabupaten Simeulue.

Tabel 30 Prosentase Peningkatan Indikator Ekonomi pada Daerah Terentaskan di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Pengeluaran Konsumsi Perkapita
1	Aceh Barat	(24.04)	3.22
2	Aceh Jaya	(23.29)	2.69
3	Aceh Timur	(28.53)	3.29
4	Bener Meriah	(16.13)	3.29
5	Simeulue	(17.27)	0.92
6	Padang Pariaman	(28.42)	6.09
7	Pesisir Selatan	(23.54)	1.56
8	Sawah Lunto/Sijunjung	(23.55)	1.94
9	Solok	(25.26)	2.59
10	OKU Selatan	(27.95)	2.50
11	Pamekasan	(25.79)	2.76
12	Pangkajene Kepulauan	(22.20)	2.26
13	Banggai	(37.25)	3.40
14	Konawe Selatan	(32.90)	2.69
15	Mimika	(24.58)	2.51

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin rendah nilai pada indikator persentase penduduk miskin, maka hal ini berkorelasi positif dengan pengentasan ketertinggalan wilayah. Sementara semakin tinggi nilai pada indikator pengeluaran konsumsi per kapita maka hal ini berkorelasi positif terhadap pengentasan ketertinggalan wilayah

4.5 Faktor Sumber Daya Manusia

Indeks sumber daya manusia dilihat dari tiga indikator, yaitu harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta angka melek huruf. Tabel berikut menggambarkan prosentase peningkatan indikator sumber daya manusia pada daerah terentaskan di Indonesia. Dapat diketahui bahwa pengentasan ketertinggalan paling tinggi berada pada indikator rata-rata lama sekolah yang mana sepuluh dari 15 daerah terentaskan di Indonesia memiliki peningkatan yang tinggi dalam rata-rata lama sekolah yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas manusia yang cukup signifikan, terutama di Kabupaten Pamekasan, Pesisir Selatan, serta Pangkajene Kepulauan. Pada Kabupaten Konawe Selatan dan Padang Pariaman pengentasan ketertinggalan tertinggi pada bidang sumber daya manusia tidak berada pada rata-rata lama sekolah, tapi pada indikator harapan hidup yang menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas terhadap kesehatan masyarakat.

Tabel 31 Prosentase Peningkatan Indikator Sumber Daya Manusia pada Daerah Terentaskan di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	Harapan Hidup	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf
1	Aceh Barat	1.10	7.46	1.13
2	Aceh Jaya	0.91	0.82	2.07
3	Aceh Timur	1.07	2.18	1.00
4	Bener Meriah	0.94	5.78	1.80
5	Simeulue	0.33	7.72	0.56
6	Padang Pariaman	6.01	1.41	(0.72)
7	Pesisir Selatan	1.75	12.02	4.02
8	Sawah Lunto/Sijunjung	2.07	5.43	1.89
9	Solok	2.18	10.41	0.21
10	OKU Selatan	0.51	8.44	0.90
11	Pamekasan	3.16	12.18	6.17
12	Pangkajene Kepulauan	1.04	10.71	5.02
13	Banggai	1.36	6.05	0.37
14	Konawe Selatan	1.38	1.24	0.05
15	Mimika	1.92	3.64	1.58

Sumber: Hasil Analisis, 2016
Keterangan: Semakin tinggi nilai, maka hal ini berkorelasi positif dengan pengentasan ketertinggalan wilayah

4.6 Faktor Kapasitas Keuangan Daerah

Tabel berikut menggambarkan prosentase peningkatan pada indikator kepasitas keuangan daerah yang dihitung dengan menggunakan celah fiscal pada masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Dapat diketahui bahwa dari 15 daerah yang terentaskan di Indonesia, daerah yang mengalami peningkatan kapasitas keuangan daerah tinggi berada di Kabupaten Aceh Jaya (123,54%), Aceh Barat (94,20%), dan Kabupaten Padang Pariaman (80,73%). Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah timur, seperti Mimika, Pangkajene Kepulauan, dan Banggai, laju peningkatan kapasitas keuangannya lebih rendah daripada daerah terentaskan lain yakni di bawah 40%. Semakin tinggi peningkatan kapasitas keuangan daerah, maka hal ini menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemandirian wilayah dalam membiayai pembangunannya.

Tabel 32 Prosentase Peningkatan Indikator Kapasitas Keuangan Daerah pada Daerah Terentaskan di Indonesia

No	Kabupaten/Kota	KKD
1	Aceh Barat	94.20
2	Aceh Jaya	123.54
3	Aceh Timur	36.98
4	Bener Meriah	57.55
5	Simeulue	30.36
6	Padang Pariaman	80.73

No	Kabupaten/Kota	KKD
7	Pesisir Selatan	46.34
8	Sawah Lunto/Sijunjung	65.16
9	Solok	69.85
10	OKU Selatan	71.52
11	Pamekasan	68.18
12	Pangkajene Kepulauan	28.06
13	Banggai	39.98
14	Konawe Selatan	56.21
15	Mimika	35.57

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan: Semakin tinggi nilai, maka hal ini berkorelasi positif dengan pengentasan ketertinggalan wilayah

4.7 Sintesa Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Daerah Tertinggal di Indonesia

Pada bagian ini berupaya untuk mensintesiskan indikator statistik yang berpengaruh terhadap pengentasan daerah tertinggal. Berikut tabel penjelasannya.

Tabel 33 Sintesis Indikator Statistik yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Daerah Tertinggal di Indonesia

No	Kabupaten	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibiltas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Simpulan
1	Aceh Barat	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk • Dokter per 1000 penduduk • Rumah tangga pengguna telepon	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini masih agak tertinggal, tapi mengalam peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini masih agak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini merupakan indeks dengan tingkat terentaskan paling tinggi, tapi pertumbuhannya lambat. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini masih agak tertinggal dengan peningkatan yang cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah) dan aksesibilitas (akses pendidikan)
2	Aceh Jaya	Indeks ini merupakan indeks dengan tingkat terentaskan paling tinggi, dan pertumbuhan yang tinggi pula. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa tanpa bangunan pasar permanen	Indeks ini masih tertinggal, tapi laju pertumbuhannya tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini masih agak tertinggal dengan laju pertumbuhan lambat. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah tidak tertinggal, tapi laju pertumbuhannya sangat lambat. Indikator yang paling berpengaruh adalah angka melek huruf	Indeks ini masih agak tertinggal dengan tingkat pertumbuhan yang cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang sangat tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh peningkatan infrastruktur (pasar) dan kualitas sumber daya manusia (angka melek huruf)
3	Aceh Timur	Indeks ini memiliki tingkat keterentasan yang rendah, tapi pertumbuhannya tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa dengan jalan aspal • Prosentase rumah tangga pengguna telepon	Indeks ini sudah terentaskan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini sudah terentaskan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini masih dalam katagori tertinggal dengan laju pertumbuhan yang rendah. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang sangat lambat. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah) dan aksesibilitas (pendidikan) meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Adapun indikator dengan tingkat pertumbuhan cepat yang berpotensi

No	Kabupaten	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibiltas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Simpulan
								tinggi untuk meningkatkan keterentasan adalah infrastruktur (kualitas jalan dan telepon) serta penurunan risiko bencana
4	Bener Meriah	Indeks ini sudah terentaskan dari ketertinggalan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa jalan diperkeras • Prosentase desa yang mempunyai pasar tidak permanen • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk • Prosentase rumah tangga pengguna telepon	Indeks ini sudah terentaskan dengan tingkat pertumbuhan cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses kesehatan	Indeks ini sudah terentaskan dari ketertinggalan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pengentasan yang rendah. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan rendah	Indeks ini merupakan indeks tertinggi dalam pengentasan ketertinggalan, tapi laju pertumbuhannya sangat lambat. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini masih dalam katagori tertinggal dengan laju pertumbuhan cukup tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi	Pengentasan ketertinggalan diakibatkan oleh sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah), aksesibilitas (kesehatan), dan infrastruktur (jalan, pasar, prasarana kesehatan dan telepon)
5	Simeulue	Indeks ini sudah terentaskan dari ketertinggalan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk • SD/SMP per 1000 penduduk	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan rendah	Indeks ini merupakan indeks tertinggi dalam pengentasan ketertinggalan, dan laju pertumbuhannya sangat tinggi. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini masih dalam katagori tertinggal dengan laju pertumbuhan rendah. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang rendah	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah) dan infrastruktur (prasarana kesehatan dan pendidikan dasar)
6	Pamekasan	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengna	Indeks ini merupakan indeks tertinggi dalam pengentasan	Indeks ini sudah terentaskan dengan	Indeks ini sudah terentaskan dengan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pengentasan rendah.	Indeks ini sudah terentaskan dengan	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh

No	Kabupaten	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibiltas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Simpulan
		tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa jalan diaspal • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk • Prosentase rumah tangga pengguna telepon	ketertinggalan dengan laju pertumbuhan yang lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses kesehatan	laju pertumbuhan yang tinggi. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena tanah longsor	laju pertumbuhan sangat tinggi. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah. Indikator angka harapan hidup merupakan tertinggi kedua diantara daerah tertentaskan lainnya. Semenara perkembangan angka melek huruf merupakan yang tertinggi diantara darah terentaskan lainnya	laju pertumbuhan cukup tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi	aksesibilitas (kesehatan) dan ekonomi (penduduk miskin). Hanya pada indeks sumber daya manusia yang masih rendah.
7	Mimika	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa jalan aspal dan diperkeras • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk • Dokter per 1000 penduduk	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pengentasan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang rendah. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena tanah longsor	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang rendah. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan rendah. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan rendah. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang rendah	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh peningkatan kapasitas keuangan daerah serta kualitas sumber daya manusia
8	Pangkajene Kepulauan	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa jalan aspal • Prosentase desa dengan pasar tanpa bangunan permanen	Indeks ini masih tertinggal dengna laju pengentasan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang rendah. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena bencana lainnya	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan tinggi. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan rendah. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang rendah	Pengentasan ketertinggalan dikarenakan indikator ekonomi (prosentase penduduk miskin), kualitas sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah), serta infrastruktur (jalan, pasar, prasarana kesehatan)

No	Kabupaten	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibiltas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Simpulan
		• Prasarana kesehatan per 1000 penduduk						
9	Banggai	Indeks ini merupakan indeks dengan tingkat terentaskan tinggi dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa dengan permukaan lainnya • Prosentase desa tanpa bangunan pasar permanen • Prosentase rumah tangga pengguna telepon	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses kesehatan	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena tanah longsor	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan tinggi. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan sangat tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan sangat rendah. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini sudah terentaskan dengna laju pertumbuhan cukup tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh penurunan prosentase penduduk miskin, sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah), peningkatan infrastruktur (jalan, pasar, dan telepon)
10	Konawe Selatan	Indeks ini merupakan indeks tertentaskan tertinggi dengan laju pertumbuhan cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa jalan lainnya • Prosentase rumah tangga pengguna telepon	Indeks ini masih tertinggal denga laju pertumbuhan yang lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses pendidikan	Indeks ini sudah terentaskan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan tertinggi Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan sangat tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan rendah. Indikator yang paling berpengaruh adalah angka harapan hidup	Indeks ini suah terentaskan dengan laju pertumbuhan cukup tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh peningkatan kualitas infrastruktur (jalan dan telepon), penurunan prosentase penduduk miskin, serta sumber daya manusia (angka harapan hidup)
11	Padang Pariaman	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi:	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan lambat. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena tanah longsor	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh adalah angka harapan hidup.	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh penurunan prosentase penduduk miskin, aksesibilitas (kesehatan) serta

No	Kabupaten	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibiltas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Simpulan
		• Prosentase desa jalan diperkeras • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk	peningkatan akses kesehatan		ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Peningkatan indikator angka harapan hidup merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya	peningkatan yang tinggi	sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup)
12	Pesisir Selatan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa jalan diperkeras • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses terhadap kantor pemerintahan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena banjir	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang sangat lambat. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf tertinggi kedua diantara daerah terentaskan lainnya	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh penurunan prosentase penduduk miskin, sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah), serta kelembagaan (kemampuan keuangan daerah)
13	Sawah Lunto/ Sijunjung	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa dengan jalan diperkeras • Parasarana kesehatan per 1000 penduduk	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang cepat. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses kesehatan	Indeks ini masih tertinggal dengan laju pertumbuhan yang lambat. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang sangat lambat. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini belum terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh penurunan prosentase penduduk miskin, peningkatan infrastruktur (jalan dan prasarana kesehatan), serta sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah)
14	Solok	Indeks ini masih tertinggal dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prosentase desa dengan jalan diperkeras • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi . Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses kesehatan	Indeks ini belum terentaskan dengan laju peningkatan yang rendah. Penurunan indikator tertinggi berada pada prosentase desa terkena gempa bumi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang rendah. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini belum terentaskan dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh penurunan prosentase penduduk miskin, peningkatan infrastruktur (jalan dan prasarana kesehatan), serta sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah)

No	Kabupaten	Indeks Infrastruktur	Indeks Aksesibiltas	Indeks Karakter Wilayah	Indeks Ekonomi	Indeks SDM	Indeks Kelembagaan	Simpulan
15	OKU Selatan	Indeks ini masih tertinggal dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan tinggi: • Prasarana kesehatan per 1000 penduduk • Prosentase rumah tangga pengguna telepon	Indeks ini masih tertinggal dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Indikator dengan tingkat pertumbuhan pengentasan tertinggi berada pada peningkatan akses kesehatan	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator-indikator didalamnya justru mengalami peningkatan kerentanan	Indeks ini sudah tidak tertinggal dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Indikator yang paling berpengaruh terhadap pengetasan ketertinggalan adalah prosentase penduduk miskin dengan laju pertumbuhan tinggi	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan yang sangat rendah. Indikator yang paling berpengaruh adalah rata-rata lama sekolah	Indeks ini sudah terentaskan dengan laju pertumbuhan indeks yang cepat. Indikator kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan yang tinggi	Pengentasan ketertinggalan disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah) dan penurunan prosentase penduduk miskin.

Sumber: Hasil Analisis, 2016

5. SIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola persebaran daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil ini terlebih dahulu dilakukan verifikasi penetapan daerah tertinggal, lalu dilanjutkan dengan analisis pola daerah tertinggal dan terentaskan, dan terakhir dilakukan penilaian faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pengentasan ketertinggalan daerah.

Verifikasi pada penetapan daerah tertinggal menemukan bahwa terdapat daerah-daerah yang tidak sesuai, baik dipaksakan untuk mendapatkan katagori daerah terentaskan maupun tetap mendapatkan predikat tertinggal, dan jumlahnya meningkat pada penetapan tahun 2014. Ketidaksesuaian ini sebagian besar terjadi pada wilayah timur Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang menunjukkan bahwa pembangunan pada periode 2009-2014 nyatanya belum mampu menggeesr fokus pembangunan dari barat ke timur Indonesia serta mengimplikasikan adanya lobi politik dalam penetapan daerah tertinggal di Indonesia.

Analisis pola daerah tertinggal dan terentaskan di Indonesia menemukan bahwa pengentasan ketertinggalan yang terjadi saat ini masih cenderung bias barat, sehingga wilayah-wilayah yang berada di Timur Indonesia yang jumlah daerah tertinggalnya jauh lebih banyak, tapi laju pengentasan ketertinggalannya rendah. Selain itu hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengentasan ketertinggalan wilayah juga erat kaitannya dengan adanya kedekatan lokasi dengan perkotaan maupun pesisir, sehingga wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan kota maupun pesisir lebih cepat potensi terentaskannya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pengentasan ketertinggalan di Indonesia masih sangat bias tidak hanya pada Barat Indonesia, tapi juga masih banyak mengandalkan efek penjalaran dari wilayah perkotaan yang berada di sekitar daerah tertinggal.

Selanjutnya hasil analisis juga menemukan bahwa pengentasan ketertinggalan secara umum terjadi akibat penurunan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia yang signifikan. Penurunan kemiskinan yang pesat memberikan jawaban pengentasan ketertinggalan yang terjadi pada wilayah Sulawesi serta Sumatera bagian Barat, sementara pada Sumatera bagian Utara pengentasan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pesat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Asante, F. A., & Ayee, J. R. (2008). Decentralization and poverty reduction. *The economy of Ghana: Analytical perspectives on stability, growth and poverty*, *4*.

Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic perspectives*, *16*(4), 185–205.

Butt, S. (2010). Regional autonomy and legal disorder: The proliferation of local laws in Indonesia. *Sing. J. Legal Stud.*, 1.

Davoodi, H., & Zou, H. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study. *Journal of Urban economics*, *43*(2), 244–257.

Faoziyah, U., & Salim, W. A. (2016). Proliferation Pattern in Underdeveloped Region: Is it the Real Solution to Solve Underdeveloped Region's Problem in Decentralized Indonesia? *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *227*, 824–832.

Firman, T. (2009). Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation Of Regional Development. *Review of Urban & Regional Development Studies*, *21*(2–3), 143–157.

Friedmann, J., & Weaver, C. (1979). *Territory and function: the evolution of regional planning*. Diambil dari http://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=OHM8BHz7ih8C&oi=fnd&pg=PP8&dq=The+Problem+of+Residual+Areas+Territory+and+Function&ots=XYNMp3GTQT&sig=6U8jJJ_H5NynUAzbBbVP-Pu0m7o

Goerl, C.-A., & Seiferling, M. M. (2014). *Income inequality, fiscal decentralization and transfer dependency*. International Monetary Fund.

Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the 'Big Bang'and its aftermath: a political economy perspective. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia: The 'Big Bang'Program and Its Economic Consequences*. Diambil dari https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=rpPZ-MLJHgsC&oi=fnd&pg=PA15&dq=hoffman+kaiser+2003+raja+kecil&ots=9tUChmLt41&sig=QVsTiLKbe2gg3huHoEKutg4ABlM

Imron, M. A. (2011). Regional autonomy proliferation of region and pseudo local government in Indonesia. *Jurnal Kawistara*, *1*(2).

Kessler, A. S., & Lessmann, C. (2010). *Interregional redistribution and regional disparities: How equalization does (not) work*. Diambil dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1718928

KPDT. (2009). *Penetapan Daerah Tertinggal dalam RPJMN 2010-2014*. Jakarta: KPDT.

Meher, R. (1999). *Development Disparities in a Backward Region: A District Level Analysis*. APH Publishing.

Muhamad, E. (2018). Reducing Spatial Inequality In Indonesia: Off-The-Job Training As A Special Treatment For Underdeveloped Regions. *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, *1*(4), 405–416.

Nayyar, R. (2005). Planning for the Development of Backward Districts. *Chronic Poverty Research Centre Working Paper*. Diambil dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1756833

Neilson, J., & Shonk, F. (2014). Chained to development? Livelihoods and global value chains in the coffee-producing Toraja region of Indonesia. *Australian Geographer*, *45*(3), 269–288.

Oates, W. E. (2008). On the theory and practice of fiscal decentralization. *Institutional foundations of public finance: Economic and legal perspectives*, *165*, 176.

Persyn, D., & Algoed, K. (2009). *The effect of interregional redistribution on regional growth and convergence*. Diambil dari Katholieke Universiteit Leuven website: http://www.pcb.ub.edu/aqr/workshop2011/downloads/Persyn.pdf

Raharjo, L., & Koswara, A. Y. (2018). Tipologi Ketertinggalan Desa di Kabupaten Situbondo dengan Analisis Kluster pada ArcGIS dan Excel. *Jurnal Teknik ITS*, *7*(1), 24–27.

Smoke, P., & Lewis, B. D. (1996). Fiscal decentralization in Indonesia: A new approach to an old idea. *World Development*, *24*(8), 1281–1299.

Syahza, A. (2013). *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*.

Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.

7. LAMPIRAN

Tabel 34 Perkembangan Daerah Tertinggal Indonesia 2004, 2009, dan 2014

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
1	Aceh Singkil	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
2	Aceh Barat	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
3	Aceh Barat Daya	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
4	Aceh Besar	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
5	Aceh Jaya	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
6	Aceh Selatan	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
7	Aceh Tamiang	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
8	Aceh Tengah	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
9	Aceh Timur	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
10	Aceh Utara	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
11	Bener Meriah	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
12	Bireun	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
13	Gayo Lues	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
14	Nagan Raya	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
15	Simeulue	Aceh	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
16	Pidie	Aceh	Daerah Induk	2006	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
17	Pidie Jaya	Aceh	DOB	2006	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
18	Nias Selatan	Sumatera Utara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
19	Dairi	Sumatera Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
20	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
21	Samosir	Sumatera Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
22	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
23	Nias	Sumatera Utara	Daerah Induk	2008, 2009	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
24	Nias Barat	Sumatera Utara	DOB	2009	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
25	Nias Utara	Sumatera Utara	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
26	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
27	Pasaman Barat	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
28	Dharmas Raya	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
29	Padang Pariaman	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
30	Pasaman	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
31	Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
32	Sawah Lunto/Sijunjung	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
33	Solok	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
34	Solok Selatan	Sumatera Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
35	Kuantan Singingi	Riau	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
36	Rokan Hulu	Riau	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
37	Sarolangun	Jambi	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
38	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
39	Seluma	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
40	Bengkulu Selatan	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
41	Kapahiang	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
42	Kaur	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
43	Lebong	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
44	Mukomuko	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
45	Rejang Lebong	Bengkulu	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
46	Bengkulu Utara	Bengkulu	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
47	Bengkulu Tengah	Bengkulu	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
48	Banyu Asin	Sumatera Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
49	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
50	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
51	Oku Selatan	Sumatera Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
52	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
53	Lahat	Sumatera Selatan	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
54	Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
55	Empat Lawang	Sumatera Selatan	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
56	Lampung Timur	Lampung	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
57	Lampung Utara	Lampung	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
58	Way Kanan	Lampung	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
59	Lampung Barat	Lampung	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
60	Lampung Selatan	Lampung	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
61	Pesisir Barat	Lampung	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
62	Pesawaran	Lampung	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
63	Bangka Selatan	Bangka Belitung	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
64	Belitung	Bangka Belitung	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
65	Belitung Timur	Bangka Belitung	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
66	Natuna	Kepulauan Riau	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
67	Anambas	Kepulauan Riau	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
68	Garut	Jawa Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
69	Sukabumi	Jawa Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
70	Banjarnegara	Jawa Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
71	Rembang	Jawa Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
72	Wonogiri	Jawa Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
73	Gunung Kidul	DIY	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
74	Kulon Progo	DIY	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
75	Bangkalan	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
76	Bondowoso	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
77	Sampang	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
78	Situbondo	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
79	Madiun	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
80	Pacitan	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
81	Pamekasan	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
82	Trenggalek	Jawa Timur	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
83	Lebak	Banten	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
84	Pandeglang	Banten	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
85	Karang Asem	Bali	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
86	Bima	NTB	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
87	Dompu	NTB	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
88	Lombok Tengah	NTB	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
89	Lombok Timur	NTB	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
90	Sumbawa Barat	NTB	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
91	Lombok Barat	NTB	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
92	Lombok Utara	NTB	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
93	Alor	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
94	Ende	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
95	Lembata	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
96	Manggarai Barat	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
97	Rote Ndao	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
98	Sumba Timur	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
99	Sumbawa	NTB	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
100	Timor Tengah Selatan	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
101	Timor Tengah Utara	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
102	Flores Timur	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
103	Sikka	NTT	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
104	Belu	NTT	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
105	Kupang	NTT	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
106	Manggarai	NTT	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
107	Sumba Barat	NTT	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
108	Ngada	NTT	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
109	Malaka	NTT	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
110	Manggarai Timur	NTT	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
111	Nageko	NTT	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
112	Sabu Raijua	NTT	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
113	Sumba Barat Daya	NTT	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
114	Sumba Tengah	NTT	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
115	Bengkayang	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
116	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
117	Landak	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
118	Melawi	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
119	Sambas	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
120	Sintang	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
121	Sanggau	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
122	Sekadau	Kalimantan Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
123	Ketapang	Kalimantan Barat	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
124	Kayong Utara	Kalimantan Barat	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
125	Seruyan	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
126	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
127	Lamandau	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
128	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
129	Katingan	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
130	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
131	Sukamara	Kalimantan Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
132	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
133	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
134	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
135	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
136	Nunukan	Kalimantan Utara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
137	Malinau	Kalimantan Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
138	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
139	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
140	Kepulauan Sitaro	Sulawesi Utara	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
141	Parigi Mountong	Sulawesi Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
142	Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
143	Toli-Toli	Sulawesi Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
144	Banggai	Sulawesi Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
145	Buol	Sulawesi Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
146	Poso	Sulawesi Tengah	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
147	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
148	Donggala	Sulawesi Tengah	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
149	Morowali	Sulawesi Tengah	Daerah Induk	2013	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
150	Banggai Laut	Sulawesi Tengah	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
151	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	DOB	2013	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
152	Sigi	Sulawesi Tengah	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
153	Bombana	Sulawesi Tenggara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
154	Buton	Sulawesi Tenggara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
155	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
156	Kolaka	Sulawesi Tenggara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
157	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
158	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
159	Konawe	Sulawesi Tenggara	Daerah Induk	2007, 2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
160	Muna	Sulawesi Tenggara	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
161	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
162	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
163	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
164	Janeponto	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
165	Bantaeng	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
166	Barru	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
167	Bulukumba	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
168	Enrekang	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
169	Luwu	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
170	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
171	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
172	Pinrang	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
173	Selayar	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
174	Sinjai	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
175	Takalar	Sulawesi Selatan	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
176	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
177	Toraja Utara	Sulawesi Selatan	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
178	Boalemo	Gorontalo	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
179	Bone Bolango	Gorontalo	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
180	Pohuwato	Gorontalo	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
181	Gorontalo	Gorontalo	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
182	Gorontalo Utara	Gorontalo	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
183	Mamuju Utara	Sulawesi Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
184	Polewali Mandar	Sulawesi Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
185	Majene	Sulawesi Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
186	Mamasa	Sulawesi Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
187	Mamuju	Sulawesi Barat	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
188	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
189	Kepulauan Aru	Maluku	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
190	Maluku Tengah	Maluku	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
191	Seram Bagian Barat	Maluku	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
192	Seram Bagian Timur	Maluku	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
193	Maluku Tenggara	Maluku	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
194	Buru	Maluku	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
195	Maluku Tenggara Barat	Maluku	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
196	Buru Selatan	Maluku	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
197	Maluku Barat Daya	Maluku	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
198	Halmahera Barat	Maluku Utara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
199	Halmahera Selatan	Maluku Utara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
200	Halmahera Timur	Maluku Utara	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
201	Halmahera Tengah	Maluku Utara	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
202	Kepulauan Sula	Maluku Utara	Daerah Induk	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
203	Halmahera Utara	Maluku Utara	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
204	Morotai	Maluku Utara	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
205	Pulau Taliabu	Maluku Utara	DOB	2012	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
206	Raja Ampat	Papua Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
207	Sorong Selatan	Papua Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
208	Teluk Bintuni	Papua Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
209	Teluk Wondama	Papua Barat	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
210	Fakfak	Papua Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan
211	Kaimana	Papua Barat	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
212	Sorong	Papua Barat	Daerah Induk	2008, 2009	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
213	Maybrat	Papua Barat	DOB	2009	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
214	Tambraw	Papua Barat	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
215	Asmat	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
216	Biak Numfor	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
217	Boven Digoel	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
218	Keerom	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
219	Mappi	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
220	Merauke	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
221	Pegunungan Bintang	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
222	Supiori	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
223	Tolikara	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
224	Yahukimo	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
225	Yapen Waropen	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran		Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
226	Mimika	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan
227	Jayawijaya	Papua	Daerah Induk	2007, 2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
228	Nabire	Papua	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
229	Paniai	Papua	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
230	Puncak Jaya	Papua	Daerah Induk	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
231	Sarmi	Papua	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
232	Waropen	Papua	Daerah Induk	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
233	Deiyai	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
234	Dogiyai	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
235	Intan Jaya	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
236	Lanny Jaya	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
237	Mamberamo Raya	Papua	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
238	Mamberamo Tengah	Papua	DOB	2007	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
239	Nduga	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
240	Puncak	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal
241	Yalimo	Papua	DOB	2008	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal	Daerah Tertinggal

No	Kabupaten	Provinsi	Daerah Pemekaran/Tidak Mengalami Pemekaran	Tahun Pemekaran	Status Daerah		
					2004	2009	2014
242	Jayapura	Papua	Tidak Mengalami Pemekaran	-	Daerah Tertinggal	Daerah Terentaskan	Daerah Terentaskan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

ISSN 2656-7601